PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAN ,DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 899/VIII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyajian data dan pemberian informasi perkembangan kependudukan agar menjadi pedoman perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan provinsi dengan membentuk Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Riau;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 695);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala Provinsi Riau;
b. menyajikan dan mempresentasikan Profil Perkembangan Kependudukan skala Provinsi Riau; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan kepada Gubernur Riau.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Riau.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Agustus 2021

GUBERNUR RIAU,

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts.899/VIII/2021
TANGGAL : 19 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Gubernur Riau	Pemerintah Provinsi Riau	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Ketua
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Sekretaris
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
7.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
8.	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
9.	Aulia Hasif, SST, M.Si	Badan Pusat Statistik Provinsi Riau	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
11.	Ka.Sub. Bagian Perencanaan	Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Anggota
12.	Kasi Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir Miskin	Dinas Sosial Provinsi Riau	Anggota
13.	Rinal Farusi, S.Sos	Dinas Sosial Provinsi Riau	Anggota
14.	Ria Indah Sari, S.Si	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Riau	Anggota
15.	Erisandi	Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Anggota
16.	Kasi Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Anggota
17.	Kasi Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	Anggota
18.	Andra Sjafril, SKM, M.Kes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
19.	Dina Juliana, S.Si	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
20.	Rab Marten Noon, SE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
21.	Riona Syakbani, S.Kom	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
22.	Febria Megasari, SE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
23.	Abdul Karim	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota
24.	Endang Iskandar	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau	Anggota

GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan Ridho-Nya sehingga kami dapat menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Riau Tahun 2022 dengan lancar.

Buku ini disusun sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474/84558/MD tanggal 20 Desember 2012 perihal Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang diamanatkan pada Pasal 5 huruf e Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pasal 50 ayat (3) Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.

Profil Perkembangan Kependudukan disusun untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan informasi tentang perkembangan kependudukan, buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai aspek kependudukan Provinsi Riau sehingga dapat dimanfaatkan guna pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta pengambilan keputusan dalam penentuan kebijakan.

Buku ini berisi gambaran umum tentang kuantitas, kualitas, mobilitas penduduk dan kepemilikan Dokumen Kependudukan yang bersumber dari data dasar Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Sumber Data Warehouse hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Riau yang dihimpun dalam database kependudukan nasional hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri per tanggal 31 Desember 2021.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan dan bantuan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Riau tahun 2022 ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan buku ini.

Pekanbaru, Desember 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau

DJOKO EDY IMHAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680329 199002 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …… i

Daftar Isi ……. ii

Daftar Tabel …… v

Daftar Gambar ……. viii

BAB I PENDAHULUAN …….. 1

A. Latar Belakang Penyusunan……. 1

B. Tujuan Penyusunan……. 3

C. Ruang Lingkup ……. 3

D. Pengertian Umum ……...…….. 4

E. Sistematika Penulisan…… 9

F. Sumber Data ……. 12

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH…….. 14

A. Keadaan Geografis dan Iklim ……..... 14

B. Kondisi Demografis Daerah …… 19

C. Gambaran Ekonomi Daerah …… 20

D. Potensi Daerah …… 23

BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN……. 31

I. KUANTITAS PENDUDUK ……..... 31

A. JUMLAH DAN PERSEBARAN PENDUDUK …… 32

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 33

2. Kepadatan Penduduk …… 34

3. Laju Pertumbuhan Penduduk …….. 38

B. PENDUDUK MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI 40

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin ……..... 40

a. Rasio Jenis Kelamin …….… 41

b. Piramida penduduk …….……. 42

c. Rasio Ketergantungan …….. 45

2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin …... 47

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur ……. 48

3. Keluarga ……..... 49
a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga ……..... 50
b. Hubungan dengan kepala keluarga ……..... 51
c. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur ……. 53
d. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin 54
e. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin 56
f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan 57
g. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan ……..... 59
4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial ……... 61
a. Jumlah penduduk menurut pendidikan …… 61
b. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan …… 64
c. Jumlah Penduduk Menurut Agama ……. 69
d. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan …… 71
5. Kelahiran ……. 73
a. Jumlah Kelahiran ……... 73
b. Angka Kelahiran Kasar ……..... 74
II. KUALITAS PENDUDUK …… 76
A. KESEHATAN…… 76
1. Kelahiran…….. 77
a. Angka Kelahiran Umum…… …….. 77
b. Rasio Anak dan Perempuan Usia Subur……... 78
c. Jumlah Akseptor Aktif dan Penggunaan Metode KB…... 80
2. Kematian…….. ……. 82
a. Jumlah Kematian Bayi……...…... 83
b. Jumlah Kematian Neonatal……...…… 84
c. Jumlah Kematian Balita……...……. 85
d. Jumlah Kematian Ibu……...……. 86
B. PENDIDIKAN …… 88
1. Angka Partisipasi Kasar...…….. 89
2. Angka Partisipasi Murni……...…… 91

C. EKONOMI ……. 92
1. Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja … 93
a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja …….. 96
b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja & Menganggur 97
2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja...……. 98
3. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan…….. 100
D. SOSIAL …….……. 102
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial…….. 102
2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat ……. 103
3. Proporsi Penduduk Miskin…… 103
III. MOBILITAS PENDUDUK…….. 105
MIGRASI ..... …… 106
BAB IV KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN……. 107
I. Kepemilikan Kartu Keluarga…… 108
II. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ……. 110
III. Kepemilikan Akta ……..... 112
1. Akta Kelahiran ……..... 112
2. Akta Perkawinan ……..... 117
3. Akta Perceraian ……..... 119
4. Akta Kematian……. 121
BAB V PENUTUP …….. 123
I. KESIMPULAN …… 123
A. Aspek Kuantitas …….. 123
B. Aspek Kualitas …… 125
C. Aspek Migrasi Penduduk …… 126
D. Aspek Kepemilikan Dokumen …….. 126

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Provinsi Riau Per Kabupaten/Kota	15
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Provinsi Riau Semester II Tahun 2021	20
Tabel II.3	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	21
Tabel II.4	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Triliun Rupiah)	22
Tabel II.5	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)	22
Tabel II.6	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	23
Tabel II.7	Luas Area (ha) dan Produksi (Ton) Kelapa Sawit dan Kelapa di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	24
Tabel II.8	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (Ha) di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	25
Tabel II.9	Populasi, Produksi Daging, Produksi Telur dan Susu Ternak Tahun 2020 dan 2021	26
Tabel III.1	Jumlah Penduduk Provinsi Riau Per Jenis Kelamin Tahun 2021	34
Tabel III.2	Kepadatan Penduduk per Luas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	36
Tabel III.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Riau per Kabupaten/Kota Tahun 2021	39
Tabel III.4	Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	42
Tabel III.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Riau Tahun 2022	44
Tabel III.6	Rasio Ketergantungan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	47
Tabel III.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Riau Tahun 2021	49
Tabel III.8	Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Provinsi Riau Tahun 2021	51
Tabel III.9	Status Hubungan Keluarga Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2021	52
Tabel III.10	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur di Provinsi Riau 2021	55
Tabel III.11	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	59
Tabel III.12	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin di Provinsi Riau Tahun 2021	57
Tabel III.13	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2021	58

Tabel III.14	Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan di Provinsi Riau Tahun 2021	59
Tabel III.15	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2021	62
Tabel III.16	Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan berdasarkan golongan umur di Provinsi Riau Tahun 2021	64
Tabel III.17	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Provinsi Riau Tahun 2021	66
Tabel III.18	Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2021	70
Tabel III.19	Jumlah Penduduk Menurut Agama Berdasarkan Jenis Kelamin Se Provinsi Riau Tahun 2021	70
Tabel III.20	Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	72
Tabel III.21	Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan Berdasarkan Umur di Provinsi Riau Tahun 2021	73
Tabel III.22	Jumlah Kelahiran per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	74
Tabel III.23	Angka Kelahiran Kasar per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	75
Tabel III.24	Angka Kelahiran di Provinsi Riau Tahun 2021	78
Tabel III.25	Rasio Anak dengan Perempuan Usia Subur di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021	79
Tabel III.26	Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021	81
Tabel III.27	Angka Kematian Bayi di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021	84
Tabel III.28	Jumlah Kematian Neonatal di Provinsi Riau Tahun 2021	85
Tabel III.29	Jumlah Kematian Balita di Provinsi Riau Tahun 2021	86
Tabel III.30	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Riau Tahun 2021	88
Tabel III.31	Jenis Kematian Ibu di Provinsi Riau Tahun 2021	88
Tabel III.32	Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Riau Tahun 2021	91
Tabel III.33	Angka Partisipasi Murni di Provinsi Riau Tahun 2021	93
Tabel III.34	Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Riau Tahun 2021	97
Tabel III.35	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja di Provinsi Riau Tahun 2021	98
Tabel III.36	Angka Penggangguran Terbuka di Provinsi Riau Tahun 2021	100
Tabel III.37	Jumlah Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Riau Tahun 2021	101
Tabel III.38	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan di Provinsi Riau Tahun 2021	102

Tabel III.39	Proporsi Penduduk Penyandang Cacat Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	105
Tabel III.40	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Se Provinsi Riau	106
Tabel III.41	Angka Migrasi Masuk Antar Kabupaten Dalam Provinsi Riau Tahun 2021	108
Tabel IV.1	Jumah Kepala Keluarga yang Sudah Memiliki dan Mencetak Kartu Keluarga Provinsi Riau Tahun 2021	112
Tabel IV.2	Jumlah Wajib KTP yang sudah dan Belum Mencetak KTP-el Di Provinsi Riau Tahun 2021	114
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Kelahiran berdasarkan kelompok umur Provinsi Riau Tahun 2021	117
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan Provinsi Riau Tahun 2020	118
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akte Kawin Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2021	121
Tabel IV.6	Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Kawin Berdasarkan kelompok umur Provinsi Riau Tahun 2021	122
Tabel IV.7	Jumlah Penduduk Yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Cerai Provinsi Riau Tahun 2021	123
Tabel IV.8	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2021	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Luas Wilayah Provinsi Riau	14
Gambar III.1	Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2020	37
Gambar III.2	Grafik Jumlah Penduduk dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021	40
Gambar III.3	Piramida Penduduk Provinsi Riau Tahun 2021	45
Gambar III.4	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2021	58
Gambar III.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2021	63
Gambar III.6	Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provinsi Riau Tahun 2021	71
Gambar III.7	Rasio Perempuan Usia Subur dan Anak Tahun 2021	80
Gambar III.8	Metode KB yang digunakan pada Pasangan Usia Subur di Provinsi Riau Tahun 2021	82
Gambar III.9	Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Riau Tahun 2021	91
Gambar III.10	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Riau Tahun 2021	93
Gambar III.11	Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Riau	97
Gambar IV.1	Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dan Belum Mencetak KK Di Provinsi Riau Tahun 2021	113
Gambar IV.2	Jumlah Wajib KTP yang Sudah dan Belum Mencetak KTP-El Di Provinsi Riau Tahun 2021	114
Gambar IV.3	Penduduk yang Telah dan Belum Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2020	118

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka keadaan yang demikian ini menuntut pula pengembangan sistem administrasi kependudukan yang semakin hari semakin baik. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, potensi sumberdaya daerah maupun potensi kewilayahan lainnya. Serta ditegaskan pula bahwa daerah mempunyai kewajiban mengelola Administrasi Kependudukan. Karena administrasi kependudukan dibutuhkan sebagai data informasi perkembangan penduduk serta persebarannya guna perencanaaan pembangununan di daerah.

Pembangunan kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan cepat,kualitas rendah, persebaran tidak merata akan

menghambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas, dan daya dukung lingkungan.

Pembangunan harus dilakukan oleh penduduk dan untuk penduduk, Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Nasional dan daerah dapat berjalan dengan baik. Data kependudukan yang diolah dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang pembangunan kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan didalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Untuk memenuhi kebutuhan informasi kependudukan ini perlu disusun dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan berdasarkan database kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Provinsi Riau dan prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang. Disisi lain penyusunan

Profil Perkembangan Kependudukan ini merupakan wujud pemanfaatan data kependudukan yang tersebar diberbagai instansi.

B. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Riau Tahun 2022 adalah:

1. Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
2. Penyajian data dan Pemberikan informasi perkembangan kependudukan yang *up to date* akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah, penentuan target kinerja pembangunan, perencanaan tolok ukur kinerja pembangunan daerah serta untuk mendukung perencanaan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

C. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2010, ruang lingkup profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Riau Tahun 2021 memuat diskripsi data dan analisis implikasi atas data:

1. Kuantitas penduduk, meliputi jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi;
2. Kualitas penduduk meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial;
3. Mobilitas penduduk menampilkan data mobilitas permanen (migrasi masuk, migrasi keluar, migrasi neto).

4. Kepemilikan dokumen kependudukan meliputi kepemilikan KK, KTP, Akta (kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian).

D. PENGERTIAN UMUM

1. Kependudukan adalah hal ihkwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut (UU NO. 10 Tahun 1992).
2. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dengan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pengembangan sektor lainnya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
3. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
4. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
5. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah yang lahir, mati, pindah tempat tinggal (UU No. 10 Tahun 1992).
6. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan dasar untuk

mengembangkan kemampuan dalam menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak (UU No.10 Tahun 1992).

7. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (UU No. 10 Tahun 1992).
8. Profil adalah grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal tertentu (Sunaryo Urip-BPS).
9. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (UU No. 10 Tahun 1992).
10. Penyebaran Penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan (UU No. 10 Tahun 1992)
11. Data Regestrasi adalah data yang bersumber dari hasil pendaftaran penduduk (peristiwa kependudukan) dan pencatatan sipil (peristiwa penting).
12. Data non Registrasi adalah ciri atau nilai yang terukur yang diperoleh melalui sensus atau survey.
13. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2006).
14. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi pelaksana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).

15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga. Kartu Tanda Penduduk, dan atau Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
17. Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor indentitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006).
19. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan, gambar, atau direkam kedalam berbagai bentuk media.
20. Sumber Data adalah segala sesuatu tentang fakta yang sudah ditulis dalam bentuk media oleh Instansi/Lembaga.

21. Kelahiran atau Fertilitas diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam waktu satu generasi atau selama masa subur.
22. Kematian atau mortalitas adalah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan jumlah penduduk.
23. Angka Kelahiran Total (TFR=Total Fertility Rate) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dalam masa reproduksinya.
24. Ratio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
25. Perkembangan Kependudukan adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas, dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup (UU No. 10 Tahun 1992).
26. Mobilitas Penduduk (migrasi) adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah administratif lainnya, yang merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain.
27. Penduduk Musiman adalah salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak di daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun yangdilakukan secara berulang.
28. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

29. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
30. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
31. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
32. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke bawah dan penduduk berusia 64 tahun keatas.
33. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya di dalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.
34. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menujukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.
35. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang wanita pada masa reproduksinya jika ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.
36. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup, pada pertengahan periode yang sama.
37. Angka Kematian Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 24 hari sejak terminasi kehamilan per 1.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya.

38. Angka Partisipasi Murni (APM) Presentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah di usia yang sama.
39. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah presentase jumlah murid, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Profil perkembangan kependudukan Provinsi Riau Tahun 2021 memuat :

1. Bab I. Pendahuluan, memuat :

   Latar belakang penyusunan, tujuan penyusunan, ruang lingkup, pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan, sistematika penyusunan dan sumber data.

2. Bab II. Gambaran Umum Daerah, memuat :

   Letak geografis daerah, kondisi demografis daerah, gambaran ekonomi daerah dan potensi daerah.

3. Bab III. Perkembangan Kependudukan, memuat :

   I. Kuantitas Penduduk, mendeskripsikan tentang :

      A. Jumlah dan Persebaran Penduduk

         1. Jumlah dan Proporsi penduduk menurut jenis kelamin
         2. Kepadatan Penduduk
         3. Laju Pertumbuhan Penduduk

      B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

         1. Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut umur dan jenis kelamin

            a. Rasio Jenis Kelamin
            b. Piramida Penduduk

c. Rasio Ketergantungan

2. Jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin

   a. Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

3. Keluarga

   a. Jumlah Keluarga dan rata-rata Jumlah Anggota Keluarga

   b. Hubungan dengan Kepala Keluarga

   c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

   d. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

   e. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

   f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

   g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan status Pekerjaan

4. Penduduk menurut karakteristik sosial

   a. Jumlah penduduk menurut pendidikan

   b. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

   c. Jumlah penduduk menurut agama

   d. Jumlah penduduk menurut kecacatan

5. Kelahiran

   a. Jumlah kelahiran

   b. Angka kelahiran kasar

II. Kualitas Penduduk, mendeskripsikan tentang :

A. Kesehatan

1. Kelahiran

   a. Angka kelahiran Umum

   b. Rasio anak dan Perempuan Usia Subur

   c. Jumlah Akseptor Aktif dan Penggunaan Metode KB

2. Kematian
    a. Angka Kematian Bayi
    b. Angka kematian Neonatal
    c. Angka Kematian Balita
    d. Angka Kematian Ibu

B. Pendidikan
    1. Angka Partisipasi Kasar
    2. Angka Partisipasi Murni

C. Ekonomi
    1. Proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja
        a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja
        b. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur
    2. Angka partisipasi angkatan kerja
    3. Jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan

D. Sosial
    1. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social
    2. Proporsi penduduk penyandang cacat
    3. Proporsi penduduk miskin

III. Mobilitas Penduduk, mendeskripsikan tentang :
- Migrasi Penduduk

4. Bab IV. Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Memuat:

I. Kepemilikan Kartu Keluarga

II. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

III. Kepemilikan Akta, yaitu :

A. Akta Kelahiran

B. Akta Perkawinan

C. Akta Perceraian

D. Akta Kematian

5. Bab V. Penutup, memuat :

I. Kesimpulan

A. Aspek Kuantitas

B. Aspek Kualitas

C. Aspek Migrasi Penduduk

D. Aspek Kepemilikan Dokumen

F. SUMBER DATA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan menyebutkan bahwa data dan informasi kependudukan yang diperlukan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan bersumber dari registrasi, non registrasi; dan lintas sektor.

Data hasil registrasi penduduk bersumber dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diambil melalui Database Kependudukan Provinsi Riauyang telah dikonsolidasikan. Data dari lintas sektor sebagaimana diperoleh dari sektor lain yang terkait, seperti dinas yang menangani urusan pendidikan, urusan kesehatan, dan urusan sosial. Elemen data hasil registrasi kependudukan yang dipergunakan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas dan kualitas penduduk, dan variabel mobilitas penduduk.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

A. KEADAAN GEOGRAFIS DAN IKLIM

1. Letak Geografis

Gambar II.1
Luas Wilayah Provinsi Riau

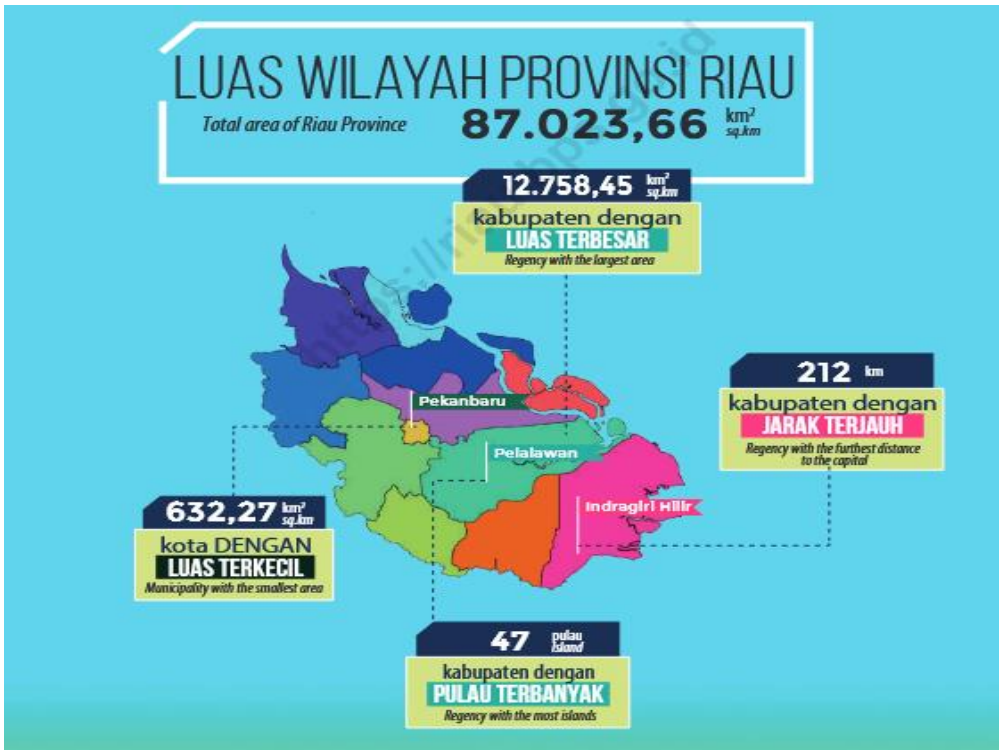

Sumber : Kementerian Dalam Negeri RI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 Provinsi Riau memiliki luas area 87.023,66 Km^2, dan itu berarti setara dengan 18,4 persen dari wilayah Pulau Sumatera. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01° 05’ 00” Lintang Selatan sampai 02° 25’ 00” Lintang Utara atau antara 100° 00’ 00” - 105° 05’ 00” Bujur Timur. Kabupaten Pelalawan adalah kabupaten dengan luas wilayah terbesar yaitu 12.758,45 Km^2. Sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kota Pekanbaru dengan luas 632,27 Km^2.

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota. Ibukota kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Riau berjarak antara 60 km hingga 293 km dari ibukota provinsi dan berada pada ketinggian sekitar 2 hingga 91 meter dari permukaan laut.

Di daratan terdapat empat sungai besar yang memiliki arti penting sebagai prasarana perhubungan yaitu Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m, Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m, Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Keempat sungai yang membentang dari dataran tinggi Bukit Barisan hingga bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan dipengaruhi pasang surut air laut.

Tabel II.1
Tinggi Wilayah, Jarak ke Ibu Kota Provinsi dan Luas Wilayah Provinsi Riau Per Kabupaten/Kota

NO KODE	KABUPATEN/KOTA	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK KE IBUKOTA (KM)	LUAS WILAYAH (Km^2)	PERSENTASE (%)
1401	KAMPAR	30	60	10.983,47	12,62
1402	INDRAGIRI HULU	4	201	7.723,80	8,88
1403	BENGKALIS	2	190	6.975,41	8,02
1404	INDRAGIRI HILIR	3	293	12.614,78	14,5
1405	PELALAWAN	5	65	12.758,45	14,66
1406	ROKAN HULU	91	180	7.588,13	8,72
1407	ROKAN HILIR	5	250	8.881,59	10,21
1408	SIAK	5	100	8.275,18	9,51
1409	KUANTAN SINGINGI	57	164	5.259,36	6,04
1410	KEPULAUAN MERANTI	2	200	3.707,84	4,26
1471	KOTA PEKANBARU	10	0	632,27	0,73
1472	KOTA DUMAI	5	176	1.623,38	1,87
14	**RIAU**			**87.023,66**	**100**

Sumber : Permendagri No.72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan Kementerian Dalam Negeri

Adapun batas-batas Provinsi Riau bila dilihat posisinya dengan negara tetangga dan provinsi lainnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Sedangkan batas-batas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau adalah :

1. Kabupaten Kampar
   - Sebelah Utara : Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
   - Sebelah Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi
   - Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak
   - Sebelah Barat : Kab. Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat
2. Kabupaten Indragiri Hulu
   - Sebelah Utara : Kabupaten Pelalawan
   - Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
   - Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir
   - Sebelah Barat : Kabupaten Kuantan Singingi
3. Kabupaten Bengkalis
   - Sebelah Utara : Selat Malaka
   - Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
   - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
   - Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
4. Kabupaten Indragiri Hilir
   - Sebelah Utara : Selat Malaka
   - Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
   - Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti
   - Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai

5. Kabupaten Pelalawan
   - Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis
   - Sebelah Selatan : Kab. Kuansing, Kab. Inhu dan Kab. Inhil
   - Sebelah Timur : Provinsi Kepulauan Riau
   - Sebelah Barat : Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
6. Kabupaten Rokan Hulu
   - Sebelah Utara : Kab. Rohil dan Provinsi Sumatera Utara
   - Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar
   - Sebelah Timur : Kabupaten Kampar
   - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat
7. Kabupaten Rokan Hilir
   - Sebelah Utara : Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
   - Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
   - Sebelah Timur : Kota Dumai
   - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Utara
8. Kabupaten Siak
   - Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
   - Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
   - Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti
   - Sebelah Barat : Kota Pekanbaru
9. Kabupaten Kuantan Singingi
   - Sebelah Utara : Kabupaten Kampar dan Kab. Pelalawan
   - Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
   - Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hulu
   - Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Barat

10. Kabupaten Kepulauan Meranti
    - Sebelah Utara : Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
    - Sebelah Selatan : Kabupaten Siak
    - Sebelah Timur : Kabupaten Kepulauan Meranti
    - Sebelah Barat : Kabupaten Siak
11. Kota Pekanbaru
    - Sebelah Utara : Kabupaten Siak
    - Sebelah Selatan : Kabupaten Pelalawan
    - Sebelah Timur : Kabupaten Pelalawan
    - Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
12. Kota Dumai
    - Sebelah Utara : Kabupaten Bengkalis
    - Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkalis
    - Sebelah Timur : Kabupaten Bengkalis
    - Sebelah Barat : Kabupaten Rokan Hilir

2. Iklim

Di Provinsi Riau, ada 5 wilayah yang melakukan pengamatan iklim, yaitu Stasiun Meterologi Indragiri Hulu di Kabupaten Indragiri Hulu, Pos Pengamatan Meteorologi Bandara RAPP Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Stasiun Klimatalogi Tambang di Kabupaten Kampar, Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, dan Pos Pengamatan Meteorologi Bandara Pinang Kampai di Kota Dumai.

Dari lima wilayah tersebut, selama tahun 2021, suhu tertinggi terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Februari dengan maksimal suhu sebesar 38,00

derajat celcius, serta suhu terendah terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan Desember dengan suhu sebesar 20,00 derajat celcius.

Dari lima wilayah tersebut, curah hujan tertinggi terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu pada Bulan April sebesar 506,2 mm, serta curah hujan terendah terjadi di Kota Pekanbaru pada Bulan Februari sebesar 30,00 mm.

Sedangkan jumlah hari hujan, terbanyak terjadi di Kabupaten Kampar pada Bulan November yaitu 24 hari, sedang Kabupaten yang paling sedikit terjadi hujan terjadi di Kabupaten Pelalawan pada bulan Juni yaitu 4 hari.

B. KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Daerah Provinsi Riau terdiri dari 10 kabupaten (Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti dan 2 kota yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Tiap Kabupaten dikepalai oleh seorang Bupati dan Kota oleh seorang Walikota. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau pada Desember Tahun 2021 terdapat 169 kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat dan 1.859 kelurahan/desa yang dikepalai oleh seorang lurah/kepala desa.

Jumlah Penduduk Provinsi Riau berdasarkan data hasil konsolidasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil semester kedua tahun 2021 berjumlah 6.574.932 jiwa, yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota.

Berikut ini dapat dilihat keadaan jumlah penduduk Provinsi Riau Semester II Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Provinsi Riau Semester II Tahun 2021

NO KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC.	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH PENDUDUK
1401	KAMPAR	21	250	816.566
1402	INDRAGIRI HULU	14	194	448.439
1403	BENGKALIS	11	155	624.231
1404	INDRAGIRI HILIR	20	236	667.672
1405	PELALAWAN	12	118	395.647
1406	ROKAN HULU	16	145	560.747
1407	ROKAN HILIR	18	184	649.212
1408	SIAK	14	131	459.311
1409	KUANTAN SINGINGI	15	229	339.333
1410	KEPULAUAN MERANTI	9	101	210.407
1471	KOTA PEKANBARU	12	83	1.074.989
1472	KOTA DUMAI	7	33	328.378
14	**RIAU**	**169**	**1.859**	**6.574.932**

Sumber :Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II 2021

C. GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Ekonomi di Riau secara *year on year* (yoy) tumbuh sebesar 4,10 persen, kalau dibandingkan dengan triwulan II 2021 (q to q) meningkat 4,59 persen.Sedangkan, untuk pertumbuhan PDRB Riau tercatat meningkat sebesar 5,84 eprsen dari -1,74 persen pada triwulan III tahun 2020 menjadi 4,10 persen tahun 2021 pada triwulan yang sama.

Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi di Riau berdasarkan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,34 persen dan Jasa Perusahaan sebesar 15,96 persen, Industri Pengolahan sebesar 5,41 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 8,43 persen serta Lapangan Usaha lainnya sebesar 12,85 persen.

Yang mana sektor Lapangan Usaha meliputi pengadaan listrik dan gas sebesar 7,60 persen, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,05 persen.

"Secara umum, perekonomian Riau masih didominasi 93,78 persen oleh lima Lapangan Usaha, yaitu industri Pengolahan 27,91 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 27,20 persen, Pertambangan dan Penggalian 20,12 persen serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,63 persen dan Konstruksi 8,92 persen," jelasnya.

Tabel II.3
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
(Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Triw I 2021	Triw IV 2021	Triw I 2022
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	34.894,20	34.845,72	62.440,68
B.	Pertambahan dan Penggalian	19.610,00	19.665,34	55.644,32
C.	Industri Pengolahan	40.106,18	41.213,26	66.527,90
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	90,09	101,76	167,25
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.231,00	17,74	22,08
F.	Konstruksi	9.943,90	11.377,46	20.571,59
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.466,94	13.408,56	22.528,13
H.	Transportasi dan Pergudangan	803,34	915,40	1.497,99
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	526,35	643,09	1.104,95
J.	Informasi dan Komunikasi	1.398,11	1.400,21	1.775,49
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.254,61	1.253,10	2.247,28
L.	Real Estate	1.107,74	1.293,98	1.825,11
M,N	Jasa Perusahaan	5,63	7,30	9,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.798,56	2.167,84	2.606,68
P	Jasa Pendidikan	584,40	710,08	1.049,01
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	293,04	325,07	536,81
R,S,T, U	Jasa Lainnya	571,50	698,80	1.006,48
Produk Domestik Regional Bruto		**123.471,83**	**130.044,70**	**241.561,68**

Sumber : BPS Provinsi Riau

Tabel II.4
PDRB Menurut Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Konstan (Triliun Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Triw I 2021	Triw IV 2021	Triw I 2022
A.	Pertanian, Kehutanan Perikanan	34.894,20	34.845,72	34.933,74
B.	Pertambahan dan Penggalian	19.610,00	19.665,34	19.923,96
C.	Industri Pengolahan	40.106,18	41.213,26	41.692,91
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	90,09	101,76	97,52
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	17.231,00	17,74	18,01
F.	Konstruksi	9.943,90	11.377,46	11.268,20
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil &Sepeda Motor	10.466,94	13.408,56	12.480,15
H.	Transportasi dan Pergudangan	803,34	915,40	867,35
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	526,35	643,09	593,83
J.	Informasi dan Komunikasi	1.398,11	1.400,21	1.440,43
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.254,61	1.253,10	1.355,69
L.	Real Estate	1.107,74	1.293,98	1.178,90
M,N	Jasa Perusahaan	5,63	7,30	6,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan JamSos Wajib	1.798,56	2.167,84	1.887,04
P	Jasa Pendidikan	584,40	710,08	610,14
Q	Jasa Kesehatan&kegiatan Sosial	293,04	325,07	322,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	571,50	698,80	621,44
Produk Domestik Regional Bruto		**123.471,83**	**130.044,70**	**129.297,75**

Sumber : BPS Provinsi Riau

Tabel II.5
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)

No	Lapangan Usaha	Triw I 2022 Terhadap Triw IV 2021	Triw I 2022 Terhadap Triw I 2021	Sumber Pertumbuhan Triw I 2022 Terhadap Triw I 2021
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,25	0,11	0,11
B.	Pertambahan dan Penggalian	1,32	1,60	1,60
C.	Industri Pengolahan	1,16	3,96	3,96
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-4,16	8,25	8,25
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,52	4,52	4,52
F.	Konstruksi	-0,96	13,32	13,32
G.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,92	19,23	19,23
H.	Transportasi dan Pergudangan	-5,25	7,97	7,97
I.	Penyediaan Akomodasi 7 Makan Minum	-7,66	12,82	12,82
J.	Informasi dan Komunikasi	2,87	3,03	3,03
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,19	8,06	8,06
L.	Real Estate	-8,89	6,42	6,42
M,N	Jasa Perusahaan	-14,00	11,51	11,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-12,95	4,92	4,92
P	Jasa Pendidikan	-14,07	4,40	4,40
Q	Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial	-0,89	9,94	9,94
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-11,07	8,74	8,74
Produk Domestik Regional Bruto		**-0,57**	**4,72**	**4,72**

Sumber : BPS Provinsi Riau

D. POTENSI DAERAH

1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan

1.1. Pertanian

Hasil pertanian sangat banyak, mulai dari padi, jagung, kedelai, sayur–sayuran, buah-buahan, tanaman obat, tanaman hias dan masih banyak lagi. Produksi padi di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.6
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

KODE	KABUPATEN/KOTA	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKTIVITAS (KU/Ha)	PRODUKSI (Ton)
1401	KAMPAR	3.437,20	34,46	11.844,00
1402	INDRAGIRI HULU	1.110,95	38,40	4.266,10
1403	BENGKALIS	4.220,71	39,69	16.751,32
1404	INDRAGIRI HILIR	15.418,14	42,02	64.784,59
1405	PELALAWAN	5.281,17	38,88	20.533,20
1406	ROKAN HULU	1.836,74	31,86	5.850,98
1407	ROKAN HILIR	7.224,01	50,47	36.456,08
1408	SIAK	7.217,39	42,69	30.811,83
1409	KUANTAN SINGINGI	5.481,44	34,11	18.694,82
1410	KEP.MERANTI	2.867,68	31,36	8.993,49
1471	KOTA PEKANBARU	-	-	-
1472	KOTA DUMAI	1.441,34	30,62	4.413,06
14	14. PROVINSI RIAU	**55.336,77**	**40,23**	**223.399,47**

Sumber :Riau Dalam Angka 2022

Produktivitas padi di Provinsi Riau sekitar 40,23 ton/ha pada tahun 202 (Tabel II.6). Kabupaten Indragiri Hilir adalah kabupaten dengan area panen padi terluas diantara kabupaten/ kota di Provinsi Riau namun produktivitasnya berada diurutan ke-3. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir memiliki area panen padi terluas kedua setelah Indragiri Hilir, dengan produktivitas tertinggi yaitu 50,47.

1.2. Perkebunan

Komoditas utama perkebunan Riau adalah kelapa sawit, dimana luas area perkebunan pada tahun 2021 sebesar 1,53 juta Ha dengan hasil produksi sekitar 3,85 juta ton. Perkebunan kelapa sawit terluas di Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Komoditas kelapa terutama berada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas area 0,34 juta Ha dan memiliki 83,21 persen dari produksi Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Luas Area (ha) dan Produksi (Ton) Kelapa Sawit dan Kelapa di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

KODE	KABUPATEN/KOTA	KELAPA SAWIT		KELAPA	
		LUAS AREA	PRODUKSI	LUAS AREA	PRODUKSI
1401	KAMPAR	226.174	560.138	1.674	449
1402	INDRAGIRI HULU	57.667	230.375	1.340	430
1403	BENGKALIS	142.831	262.292	6.080	4.062
1404	INDRAGIRI HILIR	109.270	268.864	341.793	313.396
1405	PELALAWAN	205.300	646.192	26.542	21.002
1406	ROKAN HULU	266.278	690.943	987	473
1407	ROKAN HILIR	194.357	511.349	5.129	4.130
1408	SIAK	204.896	429.353	1.438	1.551
1409	KUANTAN SINGINGI	83.101	161.317	1.259	980
1410	KEP. MERANTI	0	0	32.315	29.258
1471	KOTA PEKANBARU	6.013	9.500	15	13
1472	KOTA DUMAI	38.695	82.949	1.481	877
14	PROVINSI RIAU	**1.534.581**	**3.853.271**	**420.052**	**376.620**

Sumber :Riau Dalam Angka 2022

1.3. Kehutanan

Data Dinas Kehutanan Provinsi Riau memperlihatkan bahwa hutan lindung terluas dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar. Sementara wilayah perkotaan yaitu Kota Pekanbaru dan Dumai tidak memiliki hutan lindung.

Tabel II.8
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan (Ha) di Provinsi Riau
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

KODE	KABUPATEN/KOTA	HUTAN LINDUNG	SUAKA DAN PELESTARIAN ALAM	HUTAN PRODUKSI TERBATAS	HUTAN PRODUKSI TETAP	HUTAN PRODUKSI DPT DIKONSERVASI
1401	KAMPAR	52.554	105.126	115.439	147.948	127.134
1402	INDRAGIRI HULU	21.034	152.243	79.424	122.555	157.558
1403	BENGKALIS	31	82.658	110.098	343.736	68.247
1404	INDRAGIRI HILIR	19.896	19.573	151.569	227.740	274.602
1405	PELALAWAN	9.247	125.025	62.964	606.818	68.587
1406	ROKAN HULU	71.646	1.347	118.713	64.184	137.756
1407	ROKAN HILIR	11.636	7.455	151.850	233.321	148.017
1408	SIAK	79	73.481	6.120	324.702	11.417
1409	KUANSING	41.159	54.133	54.903	93.550	75.830
1410	KEP. MERANTI	2.494	5.289	149.754	42.807	59.412
1471	PEKANBARU	-	725	577	1.278	1.616
1472	DUMAI	-	3.567	11.754	121.265	18.859
14	PROVINSI RIAU	**229.776**	**630.622**	**1.013.166**	**2.329.904**	**1.149.035**

Sumber :Riau Dalam Angka 2022

1.4. Peternakan

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak.

Tabel II.9
Populasi, Produksi Daging, Produksi Telur dan Susu Ternak
Tahun 2020 dan 2021

PROVINSI RIAU				
NO	**JENIS TERNAK/UNGGAS**	**2020**	**2021**	**SATUAN**
1.	Sapi Perah			
	- Jumlah Ternak	84	84	Ekor
	- Produksi susu	45.369	45.369	Ton
2.	Sapi Potong			
	- Jumlah Ternak	204.433	208.522	Ekor
	- Produksi daging	8.737.301	8.912.047	Kg
3.	Kerbau			
	- Jumlah Ternak	29.309	29.749	Ekor
	- Produksi daging	1.631.055	1.655.545	Kg
4.	Kuda			
	- Jumlah Ternak	92	92	Ekor
	- Produksi daging	-	-	Kg
5.	Kambing			
	- Jumlah Ternak	235.858	238.217	Ekor
	- Produksi daging	578.579	584.365	Kg
6.	Domba			
	- Jumlah Ternak	27.640	27.916	Ekor
	- Produksi daging	19.879	20.079	Kg
7.	Babi			
	- Jumlah Ternak	41.772	42.191	Ekor
	- Produksi daging	1.035.030	1.055.734	Kg
8.	Ayam Kampung			
	- Jumlah Ternak	6.284.335	6.410.022	Ekor
	- Produksi daging	2.869.213	2.926.597	Kg
	- Produksi Telur	8.185.367	8.349.074	Ton
9.	Ayam petelur			
	- Jumlah Ternak	229.080	233.662	Ekor
	- Produksi daging	924.721	943.216	Kg
	- Produksi Telur	3.357.515	3.424.665	Ton
10.	Ayam Pedaging			
	- Jumlah Ternak	39.344.893	40.131.791	Ekor
	- Produksi daging	44.915.106	45.813.407	Kg
11.	Itik dan itik Manila			
	- Jumlah Ternak	282.920	288.579	Ekor
	- Produksi daging	204.145	208.228	Kg
	- Produksi Telur	1.500.697	1.530.673	Ton

Sumber :Riau Dalam Angka 2022

2. Pertambangan dan Energi

Produksi minyak bumi di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak 71,4 juta barel dan cenderung terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Di samping minyak mentah, sumber daya alam lainnya adalah batubara. Namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur izin tambang mineral dan batubara

serta anjloknya harga batubara menyebabkan pertambangan batubara di Riau banyak yang berhenti beroperasi.

Selain minyak bumi sebagai sumber energi, pemerintah juga mengupayakan pembangunan sumber energi kelistrikan. Pada tahun 2020, daya listrik terpasang di wilayah Riau sebesar 28.404 MW, produksi listrik sebesar 2.363.729,6 MWh dan listrik terjual sebesar 3.433.904,4 MWh.

Sebagian besar masyarakat Riau telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan (lebih dari 98 persen) dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN adalah sebesar 91,04 persen. Pada tahun 2020 jumlah pelanggan PLN sebanyak 1.809.576 sambungan pelanggan.

3. Industri Pengolahan

Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di Provinsi Riau secara triwulanan pada periode 2019 cenderung naik. Pada triwulan IV tahun 2019, pertumbuhannya sebesar 0,44 persen (*y-ony*). Jenis industri manufaktur yang mengalami pertumbuhan positif pada triwulan tersebut adalah Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik (58,83 persen); Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia (17,69 persen); dan Industri Makanan (5,53 persen).

Sementara itu, produksi industri manufaktur mikro dan kecil triwulan IV tahun 2019 tumbuh sebesar 2,91 persen (*y-on-y*) melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III tahun 2019. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan naiknya produksi Industri Pengolahan Tembakau sebesar 88,40 persen; Industri Mesin Dan Perlengkapan YTDL sebesar 39,37 persen; dan Industri Furnitur sebesar 34,38 persen. Sedangkan industri yang mengalami

pertumbuhan negatif yaitu Industri Farmasi, Obat, dan Obat Tradisional (-23,64 persen); Industri Kendaraan Bermotor (-20,82 persen); dan Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya (-10,99 persen).

4. Konstruksi

Pada tahun 2020, apabila digolongkan berdasarkan skala proyek, maka perusahaan konstruksi berskala kecil (batas nilai satu pekerjaan 0−2,5 miliar rupiah) merupakan perusahaan yang paling banyak terdapat di Provinsi Riau, yaitu berjumlah 6.425 perusahaan. Jumlah perusahaan konstruksi di Provinsi Riau pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan atau penurunan jumlah perusahaan konstruksi sejalan dengan peningkatan atau penurunan jumlah pekerja tetapnya. Pada tahun 2019, jumlah pekerja tetap dan kontrak di perusahaan konstruksi sebanyak 25.416 orang, meningkat sekitar 4,39 persen dibandingkan tahun 2018. Hal ini seiring dengan jumlah perusahaan konstruksi yang bertambah di tahun 2019.

Konstruksi di Riau yang diselesaikan pada tahun 2019 senilai lebih dari Rp 57 triliun, atau meningkat 8,77 persen dari tahun sebelumnya. Pada periode tahun 2018-2019, peningkatan terjadi pada semua jenis kontruksi bangunan, baik bangunan gedung, bangunan sipil, maupun konstruksi khusus.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Riau sebesar 95,72 yang berarti harga barang-barang konstruksi di Provinsi Riau lebih murah dibandingkan kota acuan.

5. Hotel dan Pariwisata

Jumlah akomodasi/hotel di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak 505 unit, yang terdiri dari hotel bintang 95 unit (19 persen) dan akomodasi

lainnya 410 unit (81 persen). Adapun jumlah kamar yang tersedia sebanyak 18.267 kamar yakni 8.548 kamar pada hotel bintang dan 9.719 kamar pada akomodasi lainnya. Selanjutnya jumlah tempat tidur yang tersedia di hotel bintang sebanyak 12.189 unit dan di akomodasi lainnya 15.159 unit.

Akomodasi terbanyak, baik hotel berbintang maupun akomodasi lainnya, berada di Kota Pekanbaru (29 persen) dan Kabupaten Indragiri Hilir (15 persen). Sementara jumlah akomodasi di kabupaten/kota lainnya kurang dari sepuluh persen.

Pada tahun 2020, jumlah wisatawan mancanegara yang datang melalui Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru mencapai 6.840 orang. Sebagian besar berasal dari negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan lainnya yakni sebesar 87,78 persen. Wisatawan yang berasal dari Asia (selain ASEAN) 5,96 persen, Eropa 2,43 persen, Amerika 1,45 persen, Oceania 1,43 persen, Timur Tengah 0,50 persen serta Afrika 0,45 persen.

6. Perbankan dan Investasi

Jumlah kantor bank di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebanyak 1.133 bank, terdiri dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan lainnya. Aktivitas perbankan pada tahun 2020 mengalami peningkatan, jumlah dana masyarakat pada bank mencapai Rp92,31 triliun dan kredit perbankan mencapai Rp114,40 triliun rupiah.

Pada tahun 2020, jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp114,40 triliun rupiah. Jika dilihat dari sektor ekonomi, kredit perbankan digunakan

untuk pertanian Rp25,69 triliun rupiah, perindustrian Rp16,11 triliun rupiah, perdagangan Rp12,34 triliun rupiah, dan sektor lainnya Rp60,26 triliun rupiah.

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2020 sebesar Rp34,11 triliun, naik signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini diikuti oleh kenaikan jumlah proyek. Di tahun 2020, jumlah proyek sebanyak 3.382 proyek, meningkat dibanding tahun 2019 yang sebanyak 756 proyek. Sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), realisasi tahun 2020 sebesar US$1.078 juta, naik 4,26 persen dari tahun sebelumnya dan sejalan dengan kenaikan jumlah proyek dari 416 menjadi 823 di tahun 2020.

BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

I. KUANTITAS PENDUDUK

Kuantitas penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggaldi suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil proses demografi, seperti fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi/perpindahan penduduk.

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi jika sumber daya manusia yang ada merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun jika sumber daya manusia yang berkualitas tersebut jumlahnya terbatas, maka banyaknya jumlah penduduk merupakan kendala dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat ketergantungan dari manusia yang tidak produktif terhadap manusia yang produktif. Kuantitas penduduk juga memicu munculnya permasalahan-permasalahan pembangunan yang lain, di antaranya:

a. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan.
b. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja. Hal ini menyebabkan hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang padat dan daerah yang jarang penduduknya.

c. Tingginya angka urbanisasi menyebabkan munculnya kawasan kumuhdi kota-kota besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin kota.
d. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak pada kerawanan sosial.

Banyak sedikitnya jumlah penduduk di suatu negara secara riil dipengaruhi oleh:

a. Angka kelahiran, makin tinggi angka kelahiran, maka jumlah penduduk makin bertambah.
b. Angka kematian, makin rendah angka kematian dibandingkan dengan angka kelahiran, maka jumlah penduduk makin bertambah.

Kebijakan pemerintah dalam mengatasi kuantitas penduduk, adalah sebagai berikut :

1. Mencanangkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai gerakan nasional, dengan cara memperkenalkan tujuan-tujuan program KB melalui jalur pendidikan, mengenalkan alat-alat kontrasepsi kepada pasangan usia subur, dan menepis anggapan yang salah tentang anak.
2. Menetapkan Undang-Undang Perkawinan yang di dalamnya mengatur serta menetapkan tentang batas usia nikah.
3. Membatasi pemberian tunjangan anak bagi PNS/TNI/POLRI hanya sampai anak kedua.

A. JUMLAH DAN PERSEBARAN PENDUDUK

Penduduk merupakan salah satu sumber daya yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Penduduk dapat memacu

pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu kesejahteraan penduduk juga menjadi sasaran utama proses pembangunan Indonesia, sehingga keadaan dan persebaran penduduk perlu mendapat perhatian, khususnya pada era globalisasi seperti saat ini.

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah. Persebaran penduduk menurut tempat tinggal. dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu persebaran penduduk secara geografis dan persebaran penduduk secara administratif (politis). Persebaran penduduk secara geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas- batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya. Sedangkan, persebaran penduduk secara administrasi adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang ditetapkan oleh suatu wilayah.

1. **Jumlah dan Proporsi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

   Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan data hasil konsolidasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri semester II tahun 2021 berjumlah **6.574.932** jiwa yang terdiri dari **3.360.287** jiwa laki-laki dan **3.214.645** jiwa perempuan. Tersebar di 12 Kabupaten/Kota, 172 kecamatan dan 1.862 desa/kelurahan.

   Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk Provinsi Riau Tahun 2021 semester II sebagai berikut :

Tabel III.1

Jumlah Penduduk Provinsi Riau menurut jenis kelamin, Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa

Tahun 2021

KODE KAB	KABAUPATEN/KOTA	JUMLAH			JENIS KELAMIN		PENDUDUK
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1401	KAMPAR	21	8	242	417.094	399.472	816.566
1402	INDRAGIRI HULU	14	16	178	229.710	218.729	448.439
1403	BENGKALIS	11	19	136	319.283	304.948	624.231
1404	INDRAGIRI HILIR	20	39	197	345.135	322.537	667.672
1405	PELALAWAN	12	14	104	204.135	191.512	395.647
1406	ROKAN HULU	16	6	139	285.621	275.126	560.747
1407	ROKAN HILIR	18	25	159	332.735	316.477	649.212
1408	SIAK	14	9	122	236.128	223.183	459.311
1409	KUANTAN SINGINGI	15	11	218	172.473	166.860	339.333
1410	KEPULAUAN MERANTI	9	5	96	108.472	101.935	210.407
1471	KOTA PEKANBARU	15	83	-	540.814	534.175	1.074.989
1472	KOTA DUMAI	7	36	-	168.687	159.691	328.378
14	**RIAU**	**172**	**271**	**1.591**	**3.360.287**	**3.214.645**	**6.574.932**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi semester II 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Riaupada semester II bulan Desember 2021 terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki. Dilihat per Kabupaten/Kota, Kota Pekanbaru merupakan Kota yang paling besar jumlah penduduknya sebesar 1.074.989 jiwa, kemudian Kabupaten Kampar, dan Indragiri Hilir.

Jumlah penduduk ini merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan Ditjen Kependudukan Departemen Dalam Negeri yang dilakukan berdasarkan data hasil perekaman KTP-el.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu keadaan yang dikatakan semakin padat bila jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu semakin banyak dibandingkan dengan luas ruangannya. Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni.

Kepadatan penduduk merupakan indikator dari pada tekanan penduduk disuatu daerah. Kepadatan di suatu daerah dibandingkan dengan luas tanah

yang ditempati dinyatakan dengan banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KP = \frac{JumlahPendudukSuatuWilayah}{LuasWilayah}$$

Kategori tingkat kepadatan Penduduk :

- 0 – 50 Jiwa/Km^2 : Tidak Padat
- 51 – 250 Jiwa/Km^2 : Kurang Padat
- 251 – 400 Jiwa/Km^2 : Cukup Padat
- > 400 Jiwa/Km^2 : Sangat Padat

Dampak dari kepadatan penduduk yaitu jumlah pengangguran menjadi meningkat akibat kurangnya lapangan pekerjaan yang memicu peningkatan angka kemiskinan, hal ini juga menyebabkan banyak penduduk yang mengalami kelaparan.

Adapun Faktor-faktor Penyebab Kepadatan Penduduk adalahsebagai berikut:

a. Faktor Kelahiran
b. Faktor Iklim dan Tempat Strategis
c. Faktor Ekonomi
d. Faktor Sosial

Beberapa cara mengatasi kepadatan penduduk sebagai berikut:

a. Melakukan pengendalian angka kelahiran. Pemerintah melakukan upaya pengendalian dengan memperkenalkan program KB (Keluarga Berencana) untuk mengendalikan angka kelahiran di Indonesia dan penundaan usia untuk menikah.

b. Melakukan pemindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduknya ke wilayah yang kurang penduduknya. Dengan upaya ini akan mengurangi jumlah kepadatan di wilayah yang padat penduduknya.

c. Melakukan pemerataan lapangan kerja. Pemerataan lapangan kerja dilakukan dengan mengembangkan Industri, pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan di wilayah yang lain. Dengan upaya ini diharapkan penduduk tidak terfokus untuk mencari pekerjaan di satu wilayah saja.

Berikut ini dapat dilihat luas wilayah dan kepadatan penduduk di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel III.2
Kepadatan Penduduk per Luas wilayahKabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

KD. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH (KM^2)	KEPADATAN PENDUDUK
1401	KAMPAR	816.566	10.983,47	74,34
1402	INDRAGIRI HULU	448.439	7.723,80	58,06
1403	BENGKALIS	24.231	6.975,41	89,49
1404	INDRAGIRI HILIR	667.672	12.614,78	52,93
1405	PELALAWAN	395.647	12.758,45	31,01
1406	ROKAN HULU	560.747	7.588,13	73,9
1407	ROKAN HILIR	649.212	8.881,59	73,1
1408	SIAK	59.311	8.275,18	55,5
1409	KUANTAN SINGINGI	39.333	5.259,36	64,52
1410	KEPULAUAN MERANTI	10.407	3.707,84	56,75
1471	KOTA PEKANBARU	1.074.989	632,27	1.700,21
1472	KOTA DUMAI	28.378	1.623,38	202,28
14	**PROV. RIAU**	**6.574.932**	**87.023,66**	75,55

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 87.023,66 Km^2. Kabupaten Pelalawan merupakan Kabupaten yang paling luas wilayahnya di Provinsi Riau yaitu seluas 12.758,45Km^2, dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kota Pekanbaru adalah 632,27 Km^2.

Adapun tingkat kepadatan penduduk Provinsi Riau tahun 2021 ini adalah 75,55. Angka tersebut termasuk kategori Kurang Padat. Namun bila dilihat per Kabupaten/Kota, Kota pekanbaru adalah Kota terpadat di Provinsi Riau dengan tingkat kepadatan 1.700,21 sehingga termasuk pada kategori sangat padat yaitu lebih dari 400, hal ini dikarenakan Pekanbaru mempunyai wilayah yang kecil namun jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Riau. Sedangkan yang paling kecil tingkat kepadatan penduduknya adalah Kabupaten Pelalawan,dengan kategori tidak padat.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat diagram kepadatan penduduk di Provinsi Riauberdasarkan data hasil konsolidasi semester II Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar III.1
Kepadatan Penduduk di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau

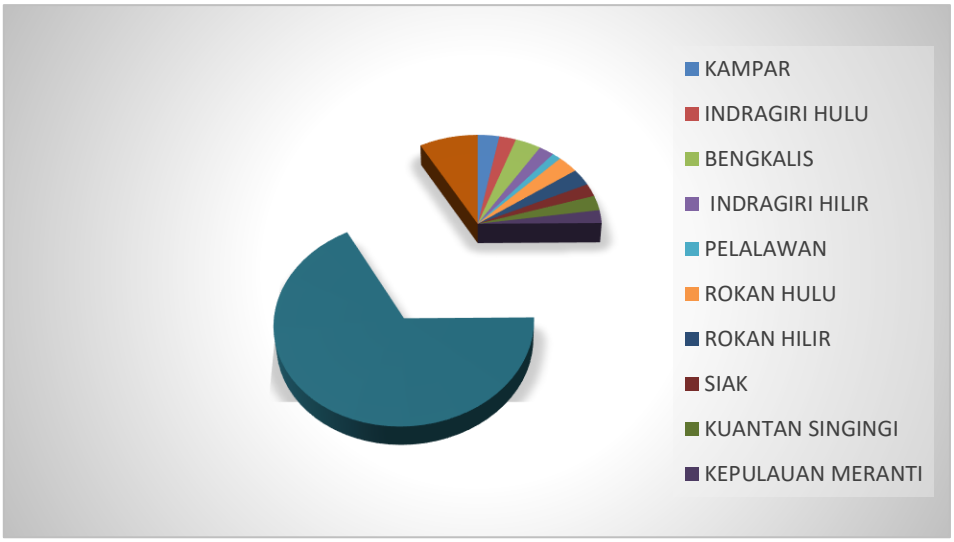

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Berdasarkan Diagram lingkaran diatas dapat dilihat Kota Pekanbaru adalah daerah terpadat dengan persentase kepadatan penduduk sebesar 67 persen, sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Pelalawan yaitu 1 %. Hal ini

disebabkan karena Kabupaten Pelalawan merupakan areal perkebunan dan mempunyai luas wilayah besar namun penduduk sedikit.

3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah pendudukdi suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Pertambahan penduduk pada suatu wilayah dalam waktu tertentu dinyatakan dalam persentase (%).

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami.

Faktor penyebab utama ini adalah adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama kemajuan di bidang kesehatan.Dengan kemajuan teknologi kesehatan kelahiran dapat diatur dan kematian dapat dicegah. Ini semua mengakibatkan menurunnya angka kematian secara 38rastic atau mencolok.

Kriteria Angka Pertumbuhan Penduduk :

- Rendah : < 1%
- Sedang : antara 1% - 2%
- Tinggi : > 2%

Berikut ini dapat dilihat angka pertumbuhan penduduk Provinsi Riau Semester II Tahun 2017sampai dengan semester II Tahun2021 sebagai berikut :

Tabel III.3

Laju PertumbuhanPenduduk Provinsi Riau per Kabupaten/Kota Tahun 2021

KD. KAB	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
		2017	2018	2019	2021	
1401	KAMPAR	742.049	748.956	754.629	816.566	1,93
1402	INDRAGIRI HULU	423.153	427.771	430.230	448.439	1,17
1403	BENGKALIS	538.654	544.144	553.938	624.231	2,99
1404	INDRAGIRI HILIR	617.624	622.281	629.841	667.672	1,57
1405	PELALAWAN	366.844	369.048	371.220	395.647	1,52
1406	ROKAN HULU	554.152	556.199	557.726	560.747	0,24
1407	ROKAN HILIR	633.566	638.679	640.492	649.212	0,49
1408	SIAK	417.386	422.869	430.092	459.311	1,93
1409	KUANSING	328.855	330.966	333.143	339.333	0,63
1410	KEP. MERANTI	207.027	208.580	209.358	210.407	0,32
1471	KOTA PEKANBARU	900.465	915.866	959.830	1.074.989	3,61
1472	KOTA DUMAI	283.872	288.741	302.070	328.378	2,96
14	**PROV. RIAU**	**6.013.647**	**6.074.100**	**6.172.569**	**6.574.932**	**1,8**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Laju pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir, terhitung dari tahun 2017 s/d 2021 semester II adalah 1,80 persen, angka tersebut tergolong dalam kategori sedang yaitu diantara 1 persen sampai dengan2 persen. Dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi Kota Pekanbaru sebesar 3,61 persen. Kemudian Kota Dumai yaitu 2,96 persen, dan Kabupaten Bengkalis 2,99 persen. Laju pertumbuhan penduduk ini berada diangka lebih dari 2 sehingga termasuk dalam kategori tinggi.

Sedangkan laju pertumbuhan terendah adalah Kabupaten Rokan Hulu yaitu 0,24, hal ini disebabkan adanya perpindahan penduduk 5 (lima) desa ke Kabupaten Kampar yang terjadi pada tahun 2016 yang masih berdampak sampai tahun 2021 ini. Namun laju pertumbuhan tersebut memiliki tren naik setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat darijumlah penduduk dari tahun 2017, sampai tahun 2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar III.2
Grafik Jumlah Penduduk dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021

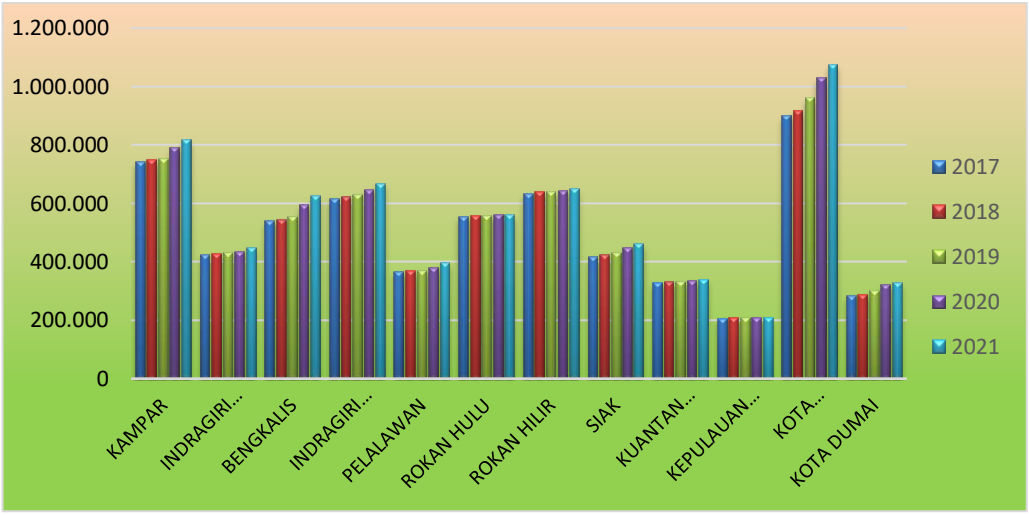

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat diihat jumlah penduduk naik setiap tahunnya, terutama Kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang besar dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Hal ini hendaknya menjadi perhatian Pemerintah dalam membuat kebijakan untuk pencegahan lonjakan penduduk terutama karena migrasi agar tidak terjadi kepadatan penduduk yang tinggi.

B. PENDUDUK MENURUT KARAKTERISTIK DEMOGRAFI

1. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun kebutuhan dasar bagi penduduk yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Kelompok penduduk dibawah 5 tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan,

mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian. Hal sama, juga penting untuk kelompok remaja khususnya perempuan, ketika menyusun program-program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan remaja perempuan menjadi calon ibu yang prima.

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (RJK) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, karena adat dan kebiasaan jaman dulu yang lebih mengutamakan pendidikan laki-laki dibanding perempuan, maka pengembangan pendidikan berwawasan gender harus memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama. Informasi tentang rasio jenis kelaminjuga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Rasio Jenis Kelamin diperoleh dengan membagi jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan dan hasilnya dikalikan dengan 100.

$$RJK = \frac{\sum L}{\sum P} \times k$$

Dimana :

RJK : Rasio Jenis Kelamin

$\sum L$: Jumlah Penduduk laki-laki di suatu daerah pada suatu waktu

$\sum P$: Jumlah Penduduk Perempuan di suatu daerah pada suatu waktu

k: 100 penduduk perempuan

Berikut ini dapat dilihat Rasio Jenis Kelamin penduduk Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.4
Rasio Jenis Kelamin Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

KD. KAB	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN		JUMLAH PENDUDUK	SEK RATIO
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1401	KAMPAR	417.094	399.472	816.566	104,41
1402	INDRAGIRI HULU	229.710	218.729	448.439	105,02
1403	BENGKALIS	319.283	304.948	624.231	104,7
1404	INDRAGIRI HILIR	345.135	322.537	667.672	107,01
1405	PELALAWAN	204.135	191.512	395.647	106,59
1406	ROKAN HULU	285.621	275.126	560.747	103,81
1407	ROKAN HILIR	332.735	316.477	649.212	105,14
1408	SIAK	236.128	223.183	459.311	105,8
1409	KUANTAN SINGINGI	172.473	166.860	339.333	103,36
1410	KEPULAUAN MERANTI	108.472	101.935	210.407	106,41
1471	KOTA PEKANBARU	540.814	534.175	1.074.989	101,24
1472	KOTA DUMAI	168.687	159.691	328.378	105,63
14	**PROV. RIAU**	**3.360.287**	**3.214.645**	**6.574.932**	104,53

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun2021

Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Riau sebesar 104,53 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki, yang berarti juga bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

Apabila dilihat per Kabupaten/Kota rasio jenis kelamin yang terbesar ada di Kabupaten Indragiri Hilir, Pelalawan dan Kepulauan Meranti, dengan rasio 107,01 ; 106,59 ; 106,41 dan yang terkecil adalah Kota Pekanbaru yaitu 101,24.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk di Provinsi Riau Kebanyakan adalah berjenis kelamin laki-laki walaupun perbedaannya tidak terlalu signifikan.

b. Piramida penduduk

Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan

jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan. Penduduk laki-laki biasanya digambarkan di sebelah kiri dan penduduk wanita di sebelah kanan. Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total.

Dengan mengamati bentuk piramida penduduk, banyak informasi yang didapat mengenai struktur kependudukan suatu wilayah. Dengan begitu memudahkan suatu wilayah untuk menentukan tujuan. Berbagai informasi yang dapat kita peroleh dari piramida penduduk sebagai berikut.

a. Informasi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada kelompok umur tertentu.
b. Informasi tentang perubahan penduduk baik, pertumbuhan maupun penurunan jumlah penduduk.
c. Kecenderungan keadaan penduduk di masa mendatang.

Macam-macam bentuk piramida penduduk :

a. Piramida Penduduk Muda (Expansive) : menggambarkan angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah yang menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak.
b. Piramida Penduduk Stationer (Granat) : menggambarkan tingkat kelahiran yang hampir sama dengan tingkat kematian atau bersifat stasioner
c. Piramida Penduduk Tua (Constructive) : menggambarkan tingkat kelahiran yang lebih rendah dari tingkat kematian atau bersifat konstruktif.

Tabel III.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Provinsi Riau Tahun 2021

NO URUT	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1	00-04	250.753	3,81	233.689	3,55	484.442	7,37
2	05-09	346.342	5,27	322.744	4,91	669.086	10,18
3	10-14	355.419	5,41	332.110	5,05	687.529	10,46
4	15-19	278.738	4,24	267.048	4,06	545.786	8,3
5	20-24	290.019	4,41	277.407	4,22	567.426	8,63
6	25-29	274.957	4,18	268.156	4,08	543.113	8,26
7	30-34	260.774	3,97	265.939	4,04	526.713	8,01
8	35-39	281.056	4,27	281.253	4,28	562.309	8,55
9	40-44	258.748	3,94	249.349	3,79	508.097	7,73
10	45-49	226.006	3,44	214.805	3,27	440.811	6,7
11	50-54	181.977	2,77	166.622	2,53	348.599	5,3
12	55-59	135.511	2,06	127.803	1,94	263.314	4
13	60-64	97.028	1,48	90.388	1,37	187.416	2,85
14	65-69	60.735	0,92	56.124	0,85	116.859	1,78
15	70-74	31.408	0,48	29.993	0,46	61.401	0,93
16	≥75	30.816	0,47	31.215	0,47	62.031	0,94
JUMLAH		**3.360.287**	**51,11**	**3.214.645**	**48,89**	**6.574.932**	**100**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kelompok umur terbanyak adalah dari kelompok umur 05-09 tahun dan 10-14 tahun sedangkan kelompok umur terendah terdapat kelompok umur 70-74 tahun dan ≥ 75 tahun. Hal ini menunjukan bahwa angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian bayi yang rendah.

Berikut ini dapat dilihat gambar Piramida Penduduk Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut :

Gambar III.3
Piramida Penduduk Provinsi Riau Tahun 2021

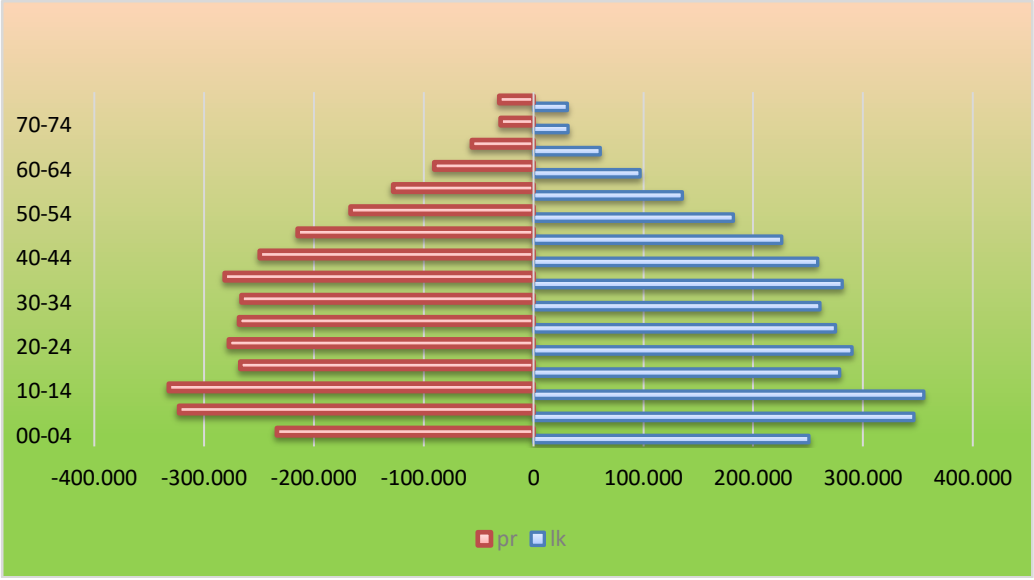

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Gambar diatas adalah piramida penduduk berbentuk limas, hal ini menggambarkan bahwa angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah menyebabkan penduduk berumur muda banyak, yaitu berusia produktif antara 15-64 tahun atau sebesar 68,52 persen pada tahun 2021. Dari piramida tersebut juga dapat dilihat kelompok usia yang terbanyak adalahantara 5-14 tahun yang merupakan usia sekolah. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama dalam mencukupi ketersediaan sekolah. Dilihat dari komposisi jenis kelamin, pada setiap kelompok umur relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non produktif dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif.

Berdasarkan hasil perhitungan ini, didapatkan berapa jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif.

Dependency Ratio merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika *dependency ratio* suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sedangkan penduduk usia 15 – 64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif.

Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja.*Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel III.6
Rasio Ketergantungan Pendudukper Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2021

KD. KAB	KABUPATEN/KOTA	USIA PRODUKTIF	USIA NON PRODUKTIF			RASIO KETERGANTUNGAN
		15-64	0-14	65+	JUMLAH	
1401	KAMPAR	557.670	231.724	27.172	258.896	46,42
1402	INDRAGIRI HULU	303.372	129.473	15.594	145.067	47,82
1403	BENGKALIS	422.812	177.238	24.181	201.419	47,64
1404	INDRAGIRI HILIR	467.834	168.747	31.091	199.838	42,72
1405	PELALAWAN	263.960	122.803	8.884	131.687	49,89
1406	ROKAN HULU	383.107	158.430	19.210	177.640	46,37
1407	ROKAN HILIR	438.793	187.758	22.661	210.419	47,95
1408	SIAK	314.231	133.142	11.938	145.080	46,17
1409	KUANSING	232.456	90.437	16.440	106.877	45,98
1410	KEP.MERANTI	145.648	52.272	12.487	64.759	44,46
1471	KOTA PEKANBARU	743.206	292.924	38.859	331.783	44,64
1472	KOTA DUMAI	220.495	96.109	11.774	107.883	48,93
14	**PROV. RIAU**	4.493.584	1.841.057	240.291	2.081.348	46,32

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Rasio ketergantungan didapat dengan cara jumlah penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun lebih) dibagi dengan jumlah penduduk produktif (15-65 tahun) lalu dikalikan 100. Rasio ketergantungan di Provinsi Riau 46,32 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Provinsi Riau menanggung 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan yang terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan sebesar 49,89 persen, sedangkan Rasio Ketergantungan terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 42,72 persen.

2. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Dalam demografi pertumbuhan penduduk antara lain dipengaruhi oleh fertilitas. Perkawinan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat fertilitas, yang secara tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai perkawinan merupakan masukan bagi perencanaan embangunan seperti

penyediaan fasilitas perumahan bagi keluarga-keluarga muda, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya.

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Dalam perhitungan angka perkawinan kasar maupun angka perkawinan umum tidak diperhatikan umur dan jenis kelamin. Perkawinan merupakan hubungan antara 2 jenis kelamin yag berbeda, dan pada umumnya mempunyai karakteristik yang berbeda. Angka perkawinan spesifik (age specific marriage rate) atau angka perkawinan menurut kelompok umur melihat penduduk berstatus kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

Kegunaan:

Angka perkawinan umur spesifik berguna untuk melihat perbedaan konsekuensi perkawinan yang berbeda antar kelompok umur dan jenis kelamin. Perbedaan tersebut menyangkut kesiapan mental, kesiapan reproduksi, dan lain sebagainya. Angka perkawinan spesifik ini memberikan gambaran persentase penduduk kawin menurut kelompok umur dan jenis kelamin, sehingga dapat dibandingkan perbedaannya.

Diketahui angka perkawinan menurut umur dan jenis kelamin ini dapat memberikan inspirasi pengembangan program-program yang ditujukan kepada remaja, seperti penundaan perkawinan, jika sudah kawin maka setidaknya bagi anak perempuan disarankan untuk menunda kehamilan sampai mencapai usia yang cukup, pelayanan kesehatan reproduksi terutama bagi anak perempuan sehingga mereka siap untuk mengarungi masa reproduksi sehat.

Tabel III. 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin Menurut Kelompok Umur di Provinsi Riau Tahun 2021

NO URUT	KELOMPOK UMUR	STATUS PERKAWINAN				JUMLAH PENDUDUK
		BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	
1	00-04	484.442				484.442
2	05-09	669.086				669.086
3	10-14	687.525	4			687.529
4	15-19	541.439	4.302	39	6	545.786
5	20-24	473.083	93.110	1.060	173	567.426
6	25-29	237.226	300.903	4.231	753	543.113
7	30-34	84.132	432.792	7.588	2.201	526.713
8	35-39	40.676	506.670	9.963	5.000	562.309
9	40-44	20.980	468.490	9.928	8.699	508.097
10	45-49	12.094	405.307	9.068	14.342	440.811
11	50-54	7.215	313.789	7.127	20.468	348.599
12	55-59	4.347	226.921	5.290	26.756	263.314
13	60-64	2.654	151.727	3.362	29.673	187.416
14	65-69	1.462	86.824	1.989	26.584	116.859
15	70-74	740	41.172	962	18.527	61.401
16	>=75	672	34.523	916	25.920	62.031
JUMLAH		3.267.773	3.066.534	61.523	179.102	6.574.932

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan status perkawinan. Dapat diketahui terdapat penduduk yang dibawah 20 tahun dengan status sudah menikah bahkan sudah bercerai baik cerai hidup maupun mati. Untuk penduduk dibawah 20 tahun yang sudah kawin sebesar 4.302 orang, status cerai hidup 36 orang dan cerai mati 6 orang. Hal ini tentu melanggar undang-undang sehingga harus menjadi perhatian instansi terkait.

3. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Salvicion dan Celis (1998) di dalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, di hidupnya

dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Berdasar Undang-Undang 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Bab I pasal 1 ayat 6 pengertian Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; atau suami, istri dan anaknya; atau ayah dan anaknya (duda), atau ibu dan anaknya (janda). Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu dan anak.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Rata-rata jumlah Anggota Rumah Tangga (ART) adalah jumlah seluruh penduduk dibagi dengan jumlah rumah tangga di suatu wilayah pada tahun tertentu. Adapun kegunaan mengetahui rata-rata keluarga adalah untuk menggambarkan kesejahteraan rumah tangga, dimana semakin kecil jumlah anggota rumah tangga biasanya akan semakin tinggitingkat kesejahteraannya danJika dihubungkan dengan kepemilikan misalnya luas tanah atau rumah yang ditinggali maka akan menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan.

Berikut ini dapat dilihat jumlah rata-rata keluarga di Provinsi Riau per Kabupten/Kota Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.8
Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KELURAGA	RATA-RATA ANGGOTA
1401	KAMPAR	816.566	242.370	3,37
1402	INDRAGIRI HULU	448.439	133.078	3,37
1403	BENGKALIS	624.231	178.399	3,5
1404	INDRAGIRI HILIR	667.672	210.216	3,18
1405	PELALAWAN	395.647	115.441	3,43
1406	ROKAN HULU	560.747	159.125	3,52
1407	ROKAN HILIR	649.212	182.651	3,55
1408	SIAK	459.311	130.397	3,52
1409	KUANTAN SINGINGI	339.333	103.819	3,27
1410	KEP. MERANTI	210.407	61.609	3,42
1471	KOTA PEKANBARU	1.074.989	312.650	3,44
1472	KOTA DUMAI	328.378	97.423	3,37
14	**RIAU**	**6.574.932**	**1.927.178**	**3,41**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui banyaknya Kepala Keluarga yang ada di Provinsi Riau sebesar 1.927.178 jiwa dari 6.574.932 jiwa total penduduk. Sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Riau tahun 2022 berkisar antara 3 – 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata anggota keluarga pada setiap Kepala Keluarga merupakan keluarga inti. Terdiri dari ayah, ibu dan 2 orang anak.

b. Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama (*living arrangement)* dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Selain itu juga untuk melihat komposisi anggota rumah tangga secara lebih rinci diperlukan keterangan mengenai siapa saja yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut. Untuk itu dilakukan pendekatan dengan hubungan anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga. Setiap anggota rumah tangga mempunyai status hubungan dengan kepala rumah tangga seperti suami/istri dari kepala rumah tangga, anak,

menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua. Termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga atau orang lain misalnya anak kos.

Data mengenai komposisi anggota rumah tangga dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran perbedaan antara rumah tangga dan keluarga. Rumah Tangga dengan anggota rumah tangga yang memiliki hubungan garis lurus (kekerabatan) dengan kepala rumah tangga disebut sebagai keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keluarga adalah juga rumah tangga tetapi rumah tangga belum tentu keluarga.

Berikut ini dapat dilihat hubungan anggota keluarga di Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel diatas menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dengan Kepala Keluarga, baik :

Tabel III.9

Status Hubungan Keluarga Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2021

NO URUT	STATUS HUBUNGAN DALAM KELUAGA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	KEPALA KELUARGA	1.632.854	294.324	1.927.178
2.	SUAMI	131		131
3.	ISTRI		1.437.944	1.437.944
4.	ANAK	1.682.721	1.432.138	3.114.859
5.	MENANTU	67	78	145
6.	CUCU	8.034	6.693	14.727
7.	ORANG TUA	1.191	8.756	9.947
8.	MERTUA	939	8.301	9.240
9.	FAMILI LAIN	31.896	24.348	56.244
10.	PEMBANTU	20	46	66
11.	LAINNYA	2.434	2.017	4.451
JUMLAH		3.360.287	3.214.645	6.574.932

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

mereka yang masih mempunyai hubungan kekerabatan maupun tidak, seperti pembantu rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Pada tabel

diatas, tampak bahwa kepala keluarga laki-laki umumnya mempunyai istri/pasangan, yaitu sebanyak 1.632.854 Kepala Keluarga laki-laki terdapat 1.437.944 istri. Akan tetapi dari 294.324 Kepala Keluarga Perempuan hanya terdapat 131 suami saja. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan kondisi tersebut diantaranya adalah kepala keluarga mempunyai status perkawinan belum kawin, cerai hidup ataupun cerai mati. Ada kemungkinan juga bahwa suami/istri tidak tinggal dalam satu tempat (bekerja di luar daerah). Status hubungan dengan kepala keluarga yaitu anak merupakan angka yang terbesar dalam status hubungan dengan kepala keluarga.

Adapun proporsi anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang berstatus sebagai menantu, cucu, orang tua, mertua dan family lainnya menunjukkan proporsi yang rendah. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga luas (*extended family*) di Provinsi Riau tidak besar.

c. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Berikut ini dapat dilihat Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan kelompok umur di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel. III.10
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur
di Provinsi Riau Tahun 2021

NO URUT	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH KEPALA KELUARGA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	15-19	2.526	1.870	4.396
2	20-24	35.087	9.457	44.544
3	25-29	131.794	15.700	147.494
4	30-34	208.063	18.705	226.768
5	35-39	256.740	22.814	279.554
6	40-44	247.726	25.596	273.322
7	45-49	220.769	30.182	250.951
8	50-54	179.437	33.398	212.835
9	55-59	134.068	36.461	170.529
10	60-64	96.116	35.177	131.293
11	65-69	60.041	28.091	88.132
12	70-74	30.850	17.510	48.360
13	>=75	29.637	19.363	49.000
14	JUMLAH	1.632.854	294.324	1.927.178

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah terbesar sebagai kepala keluarga adalah pada kelompok umur 35–39 tahun yaitu sebanyak 279.554 orang, sedangkan jumlah terkecil terdapat sebagai kepala keluarga terdapat pada kelompok umur antara 15 – 19 tahun sebanyak 4.396 orang.

d. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggung jawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai atau sebab-sebab yang lain.

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya di masa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu tren gaya hidup modern. Berikut adalah tabel yang menunjukkan distribusi Kepala Keluarga menurut jenis kelamin di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Informasi tentang karakteristik kepala keluarga merupakan informasi yang penting terutama dalam program pengentasan kemiskinan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

Berikut ini dapat dilihat Jumlah Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel III.11
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin
per Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN KEPALA KELUARGA		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1401	KAMPAR	206.255	36.115	242.370
1402	INDRAGIRI HULU	114.767	18.311	133.078
1403	BENGKALIS	150.616	27.783	178.399
1404	INDRAGIRI HILIR	175.620	34.596	210.216
1405	PELALAWAN	100.834	14.607	115.441
1406	ROKAN HULU	137.650	21.475	159.125
1407	ROKAN HILIR	155.142	27.509	182.651
1408	SIAK	113.922	16.475	130.397
1409	KUANTAN SINGINGI	85.988	17.831	103.819
1410	KEP. MERANTI	50.891	10.718	61.609
1471	KOTA PEKANBARU	260.031	52.619	312.650
1472	KOTA DUMAI	81.138	16.285	97.423
14	**RIAU**	**1.632.854**	**294.324**	**1.927.178**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Kepala Keluarga laki-laki lebih banyak jumlahnya yaitu 1.632.854 orang dibandingkan kepala keluarga perempuan yang berjumlah 294.324 orang.

Persentase rata-rata untuk kepala keluarga laki-laki di Provinsi Riau adalah sebesar 84,72 persen. Sedangkan kepala keluarga perempuan 15,27 persen dengan perbandingan 2 : 8.

e. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin

Kepala keluarga adalah seseorang dari sekelompok anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai Kepala Keluarga. Seorang pemimpin yang baik tidaklah mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan kepentingan seluruh awaknya. Seorang pemimpin tidak mementingkan kebutuhan seorang anggotanya saja, tapi semua awaknya.

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga baik secara ekonomi, sosial maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun cerai mati.

Berikut ini dapat dilihat KarakteristikKepala Keluarga berdasarkan status perkawinan di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel III.12
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin
di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	STATUS PERKAWINAN KEPALA KELUARGA				JUMLAH KEPALA KELUARGA
		BELUM KAWIN	KAWIN	CERAI HIDUP	CERAI MATI	
1401	KAMPAR	11.006	206.057	7.456	17.851	242.370
1402	INDRAGIRI HULU	3.774	112.957	5.320	11.027	133.078
1403	BENGKALIS	5.941	148.686	4.609	19.163	178.399
1404	INDRAGIRI HILIR	11.019	177.706	4.309	17.182	210.216
1405	PELALAWAN	6.227	99.327	2.718	7.169	115.441
1406	ROKAN HULU	6.832	135.852	4.969	11.472	159.125
1407	ROKAN HILIR	7.012	156.005	3.515	16.119	182.651
1408	SIAK	5.980	111.954	3.058	9.405	130.397
1409	KUANTAN SINGINGI	3.212	87.479	4.054	9.074	103.819
1410	KEP. MERANTI	2.808	49.054	2.213	7.534	61.609
1471	KOTA PEKANBARU	20.635	253.220	11.660	27.135	312.650
1472	KOTA DUMAI	7.085	77.316	4.057	8.965	97.423
14	**RIAU**	**91.531**	**1.615.613**	**57.938**	**162.096**	**1.927.178**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Dari data diatas dapat dilihat status dari kepala keluarga, baik yang belum kawin,sudah kawin, cerai hidup maupun cerai mati. Jumlah kepala keluarga terbesar adalah yang berstatus kawin yaitu **1.615.613 KK** dengan kelompok umur terbesar antara 35 – 39 tahun, kemudian cerai mati **162.096 KK** dengan kelompok umur terbesar antara 60 – 64 tahun, belum kawin **91.531 KK** dengan kelompok umur terbesar 25 – 29 tahun**,** dan cerai hidup 5.7938 **KK** dengan kelompok umur terbesar 40 – 44 tahun.

f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel III.13
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. URUT	TINGKAT PENDIDIKAN AKHIR	JENIS KELAMIN				KEPALA KELUARGA	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1.	TIDAK/BLM SEKOLAH	47.340	2,46	21.207	1,1	68.547	3,56
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	59.118	3,07	22.804	1,18	81.922	4,25
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	478.809	24,85	121.144	6,29	599.953	31,13
4.	SLTP/SEDERAJAT	316.822	16,44	46.541	2,41	363.363	18,85
5.	SLTA/SEDERAJAT	574.970	29,83	63.026	3,27	637.996	33,11
6.	DIPLOMA I/II	12.218	0,63	3.133	0,16	15.351	0,8
7.	AKADEMI/DIPLOMA III/SARMUD	26.594	1,38	4.661	0,24	31.255	1,62
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	107.609	5,58	11.050	0,57	118.659	6,16
9.	STRATA-II	8.844	0,46	693	0,04	9.537	0,49
10.	STRATA-III	530	0,03	65	0	595	0,03
JUMLAH		**1.632.854**	**84,73**	**294.324**	**15,27**	**1.927.178**	**100**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan kepala keluarga di Provinsi Riau, dimana pendidikan kepala keluarga paling banyak adalah tamatan SLTA sebesar 33,11 persen, kemudian berpendidikan Sekolah Dasar sebesar 31,13 persen, kemudian tingkat SLTP 18,85 persen, sedangkan yang berpendidikan diploma sampai sarjana lebih kurang 6,16 persen.

Gambar III.4
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Provinsi Riau Tahun 2021

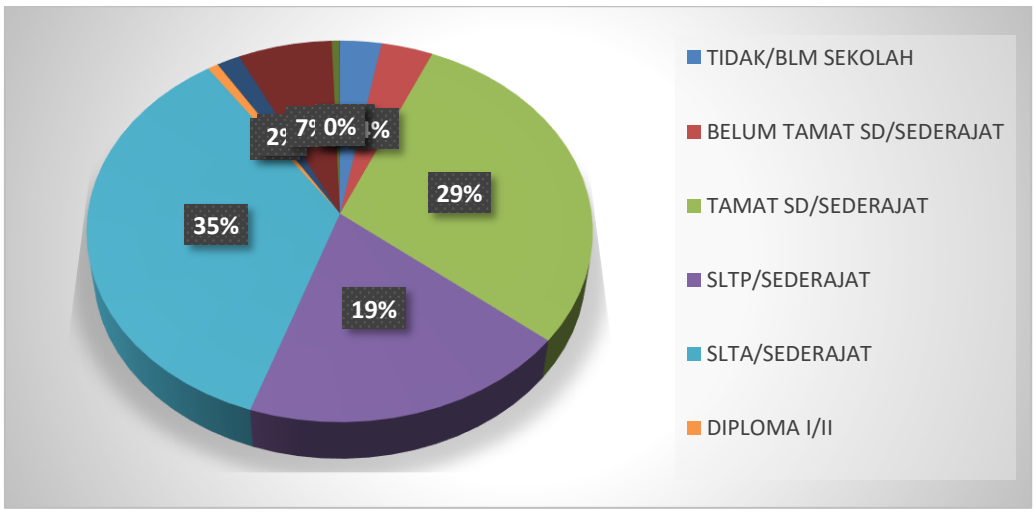

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

g. Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Berikut ini dapat dilihat KarakteristikKepala Keluarga berdasarkan status pekerjaan di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel III.14
Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan di Provinsi Riau Tahun 2021

NO URUT	JENIS PEKERJAAN KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN		
		LK	PR	LK+PR
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	20.110	11.544	31.654
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA		190.556	190.556
3.	PELAJAR/MAHASISWA	15.374	8.346	23.720
4.	PENSIUNAN	14.205	2.463	16.668
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	42.154	6.656	48.810
6.	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	5.664	3	5.667
7.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	8.755	53	8.808
8.	PERDAGANGAN	9.006	966	9.972
9.	PETANI/PEKEBUN	433.316	32.508	465.824
10.	PETERNAK	383	34	417
11.	NELAYAN/PERIKANAN	20.321	156	20.477
12.	INDUSTRI	214	29	243
13.	KONSTRUKSI	457	11	468
14.	TRANSPORTASI	1.118	5	1.123
15.	KARYAWAN SWASTA	236.115	8.484	244.599
16.	KARYAWAN BUMN	17.171	599	17.770
17.	KARYAWAN BUMD	1.450	55	1.505
18.	KARYAWAN HONORER	17.574	1.379	18.953
19.	BURUH HARIAN LEPAS	87.632	1.663	89.295
20.	BURUH TANI/PERKEBUNAN	39.263	2.177	41.440
21.	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	2.906	65	2.971
22.	BURUH PETERNAKAN	186	19	205
23.	PEMBANTU RUMAH TANGGA	13	617	630

24.	TUKANG CUKUR	392	1	393
25.	TUKANG LISTRIK	417		417
26.	TUKANG BATU	2.084	12	2.096
27.	TUKANG KAYU	2.388	1	2.389
28.	TUKANG SOL SEPATU	77	2	79
29.	TUKANG LAS/PANDAI BESI	936	4	940
30.	TUKANG JAHIT	1.169	301	1.470
31.	TUKANG GIGI	47	1	48
32.	PENATA RIAS	20	46	66
33.	PENATA BUSANA	10	6	16
34.	PENATA RAMBUT	96	38	134
35.	MEKANIK	3.221	3	3.224
36.	SENIMAN	171	4	175
37.	TABIB	44	14	58
38.	PARAJI	42	9	51
39.	PERANCANG BUSANA	12	8	20
40.	PENTERJEMAH	6	1	7
41.	IMAM MASJID	345		345
42.	PENDETA	896	17	913
43.	PASTOR	16		16
44.	WARTAWAN	625	13	638
45.	USTADZ/MUBALIGH	365	3	368
46.	JURU MASAK	56	27	83
47.	PROMOTOR ACARA	2		2
48.	ANGGOTA DPR RI	5		5
49.	ANGGOTA DPD RI	2		2
50.	ANGGOTA BPK	10		10
53.	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	1		1
55.	DUTA BESAR		1	1
56.	GUBERNUR	1		1
58.	BUPATI	8		8
59.	WAKIL BUPATI	8		8
60.	WALIKOTA	2		2
61.	WAKIL WALIKOTA	1		1
62.	ANGGOTA DPRD PROP.	24	3	27
63.	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	277	5	282
64.	DOSEN	1.978	196	2.174
65.	GURU	13.542	3.386	16.928
66.	PILOT	4		4
67.	PENGACARA	341	15	356
68.	NOTARIS	123	28	151
69.	ARSITEK	118	1	119

70.	AKUNTAN	19	5	24
71.	KONSULTAN	287	5	292
72.	DOKTER	1.317	176	1.493
73.	BIDAN		434	434
74.	PERAWAT	1.194	279	1.473
75.	APOTEKER	79	30	109
76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	8	1	9
77.	PENYIAR TELEVISI	6		6
78.	PENYIAR RADIO	16		16
79.	PELAUT	1.576	2	1.578
80.	PENELITI	109	6	115
81.	SOPIR	13.922	1	13.923
82.	PIALANG	20	1	21
83.	PARANORMAL	35		35
84.	PEDAGANG	18.081	2.162	20.243
85.	PERANGKAT DESA	1.767	42	1.809
86.	KEPALA DESA	518	3	521
87.	BIARAWAN/BIARAWATI		20	20
88.	WIRASWASTA	589.482	18.338	607.820
89.	PEKERJAAN LAINNYA	1.149	285	1.434
JUMLAH		**1.632.854**	**294.324**	**1.927.178**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Tabel diatas merupakan pekerjaan kepala keluarga yang terdapat dalam database kependudukan hasil konsolidasi semester II tahun 2021.

4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah penduduk menurut pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Namun ukuran ini masih harus ditambah dengan etos kerja dan keterampilan baik *hard skill* maupun *soft skill*.

Beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa yang dibutuhkan tidak hanya keterampilan tetapi juga kepribadian, karena keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang

pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjangatau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tingkat pendidikan di Provinsi Riau sudah mengalami kemajuan, meskipun demikian, tingkat pendidikan di Provinsi Riau masih tergolong rendah, apalagi di Kabupaten/Kota masih sangat banyak penduduk yang hanya tamat Sekolah Dasar, sebagaimana dapat dilihat tingkat pendidikan kepala keluarga sebagaimana diulas didepan.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain yang lebih maju, apalagi jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga masih sangat jelas pendudukdi Provinsi Riau sangat jauh tertinggal. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah untuk lebih memajukan pendidikan dengan wajib belajar 9 tahun.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel III. 15

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. URUT	TINGKAT PENDIDIDIKAN AKHIR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
1.	TIDAK/BLM SEKOLAH	1.022.890	15,56	963.403	14,65	1.986.293	30,21
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	382.162	5,81	356.085	5,42	738.247	11,23
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	632.606	9,62	648.266	9,86	1.280.872	19,48
4.	SLTP/SEDERAJAT	451.086	6,86	419.347	6,38	870.433	13,24
5.	SLTA/SEDERAJAT	703.866	10,71	602.423	9,16	1.306.289	19,87
6.	DIPLOMA I/II	13.064	0,2	27.330	0,42	40.394	0,61
7.	AKADEMI/DIP, III/SARMUDA	28.696	0,44	54.219	0,82	82.915	1,26
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	116.257	1,77	137.107	2,09	253.364	3,85
9.	STRATA-II	9.106	0,14	6.139	0,09	15.245	0,23
10.	STRATA-III	554	0,01	326	0	880	0,01
JUMLAH		3.360.287	51,11	3.214.645	48,89	6.574.932	100

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Menurut tingkat pendidikan terakhir, penduduk di Provinsi Riau banyak yang masih tamat SLTA 19,87 persen, SD/Sederajat yaitu sebesar 19,48 persen dan SLTP 13,24 persen dan berpendidikan Diploma ke atas secara keseluruhannya hanya mencapai ± 5,2 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 41,44 persen berstatus tidak/blm sekolah dan belum tamat SD/sederajat yang diasumsikan penduduk berusia sekolah SD atau belum mencapai usia sekolah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat grafik jumlah penduduk menurut pendidikan berikut ini :

Gambar III.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Riau
Tahun 2021

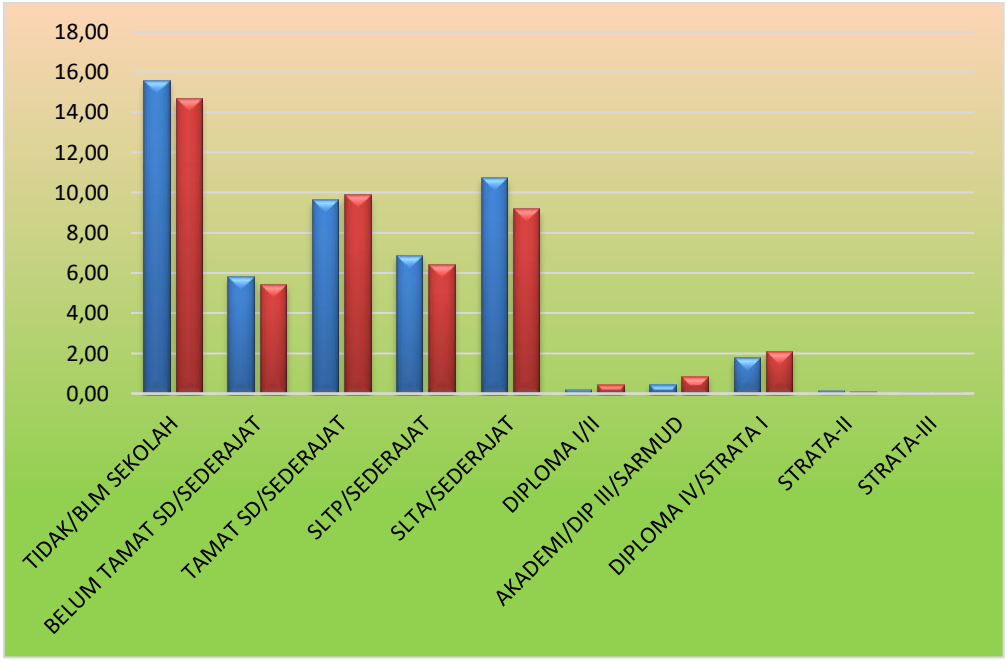

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Dibawah ini adalah tabel Jumlah penduduk menurut umur dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sehingga dapat diketahui detail pendidikan penduduk apakah memang pendidikan terakhirnya atau karena belum memasuki usia untuk pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel III.16
Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan berdasarkan golongan umur di Provinsi Riau Tahun 2021

NO URUT	KELOMPOK UMUR	PENDIDIKAN AKHIR					
		TIDAK/BLM TAMAT SD	BLM TAMAT SD/SEDERAJAT	SD SEDERAJAT	SLTP SEDERAJAT	SLTA SEDERAJAT	DIP I/II
1	00-04	484.442					
2	05-09	637.320	31.766				
3	10-14	514.406	154.015	19.108			
4	15-19	206.049	213.325	64.372	48.635	13.405	
5	20-24	30.083	197.021	117.131	107.266	110.528	302
6	25-29	10.994	29.539	104.478	136.985	204.134	1.681
7	30-34	11.365	11.679	97.835	102.903	219.176	5.128
8	35-39	13.195	13.252	130.573	119.898	208.377	11.015
9	40-44	13.025	13.269	141.837	110.264	175.336	7.588
10	45-49	11.754	12.753	139.484	93.145	144.196	4.270
11	50-54	11.073	12.772	119.720	62.990	109.492	3.470
12	55-59	11.104	13.770	115.203	36.880	62.761	3.056
13	60-64	10.431	13.231	99.517	24.317	28.517	1.953
14	65-69	7.604	9.640	64.091	14.836	15.737	1.110
15	70-74	5.345	6.031	34.220	6.643	7.232	558
16	>=75	8.214	7.378	34.638	5.154	5.352	251
JUMLAH		1.986.404	739.441	1.282.207	869.916	1.304.243	40.382

Sumber :Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Lanjutan Tabel III.17

NO URUT	KELOMPOK UMUR	PENDIDIKAN AKHIR			
		AKADEMI/DIP III/ SARJANA	DIP. IV / STRATA I	STRATA II	STRATA III
1	00-04				
2	05-09				
3	10-14				
4	15-19				
5	20-24	1.256	3.809	28	2
6	25-29	11.259	42.656	1.352	35
7	30-34	19.269	56.547	2.750	61
8	35-39	17.455	46.309	2.143	92
9	40-44	12.027	32.694	1.961	96
10	45-49	7.800	25.250	2.046	113
11	50-54	5.826	21.138	1.956	162
12	55-59	3.717	15.044	1.631	148
13	60-64	2.119	6.387	857	87
14	65-69	1.156	2.285	354	46
15	70-74	525	709	117	21
16	>=75	492	486	50	16
JUMLAH		82.901	253.314	15.245	879

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

b. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat

tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang.

Tabel III.17
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk
Provinsi Riau Tahun 2021

TINGKAT PENDIDIDIKAN AKHIR	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
TIDAK/BLM SEKOLAH	KAMPAR	130.183	1,98	121.453	1,85	251.636	3,83
	INDRAGIRI HULU	64.638	0,98	61.231	0,93	125.869	1,91
	BENGKALIS	85.161	1,30	80.615	1,23	165.776	2,52
	INDRAGIRI HILIR	104.094	1,58	97.993	1,49	202.087	3,07
	PELALAWAN	58.547	0,89	55.748	0,85	114.295	1,74
	ROKAN HULU	92.657	1,41	87.946	1,34	180.603	2,75
	ROKAN HILIR	84.117	1,28	78.863	1,20	162.980	2,48
	SIAK	81.403	1,24	77.013	1,17	158.416	2,41
	KUANSING	48.548	0,74	45.840	0,70	94.388	1,44
	KEP. MERANTI	33.145	0,50	32.706	0,50	65.851	1,00
	KOTA PEKANBARU	172.063	2,62	159.910	2,43	331.973	5,05
	KOTA DUMAI	68.334	1,04	64.085	0,97	132.419	2,01
TOTAL		**1.022.890**	**15,56**	**963.403**	**14,65**	**1.986.293**	**30**
BLM TAMAT SD/SEDERAJAT	KAMPAR	41.264	0,63	38.510	0,59	79.774	1,21
	INDRAGIRI HULU	28.675	0,44	27.178	0,41	55.853	0,85
	BENGKALIS	37.819	0,58	35.353	0,54	73.172	1,11
	INDRAGIRI HILIR	49.138	0,75	45.123	0,69	94.261	1,43
	PELALAWAN	24.114	0,37	22.406	0,34	46.520	0,71
	ROKAN HULU	33.821	0,51	31.357	0,48	65.178	0,99
	ROKAN HILIR	44.785	0,68	42.239	0,64	87.024	1,32
	SIAK	24.504	0,37	22.650	0,34	47.154	0,72
	KUANSING	20.322	0,31	19.807	0,30	40.129	0,61
	KEP. MERANTI	12.714	0,19	11.315	0,17	24.029	0,37
	KOTA PEKANBARU	50.101	0,76	47.371	0,72	97.472	1,48
	KOTA DUMAI	14.905	0,23	12.776	0,19	27.681	0,42
TOTAL		**382.162**	**5,81**	**356.085**	**5,42**	**738.247**	**11,23**
TAMAT SD/SEDERAJAT	KAMPAR	75.497	1,15	79.938	1,22	155.435	2,36
	INDRAGIRI HULU	50.742	0,77	51.414	0,78	102.156	1,55
	BENGKALIS	59.280	0,90	61.269	0,93	120.549	1,83
	INDRAGIRI HILIR	93.641	1,42	87.780	1,34	181.421	2,76
	PELALAWAN	42.087	0,64	42.760	0,65	84.847	1,29
	ROKAN HULU	61.947	0,94	66.166	1,01	128.113	1,95
	ROKAN HILIR	79.936	1,22	83.456	1,27	163.392	2,49

TINGKAT PENDIDIDIKAN AKHIR	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
	SIAK	40.545	0,62	41.465	0,63	82.010	1,25
	KUANSING	36.185	0,55	38.148	0,58	74.333	1,13
	KEP. MERANTI	30.634	0,47	28.353	0,43	58.987	0,90
	KOTA PEKANBARU	40.194	0,61	44.493	0,68	84.687	1,29
	KOTA DUMAI	21.918	0,33	23.024	0,35	44.942	0,68
TOTAL		**632.606**	**9,62**	**648.266**	**9,86**	**1.280.872**	**19,48**
SLTP/SEDERAJAT	KAMPAR	65.933	1,00	60.910	0,93	126.843	1,93
	INDRAGIRI HULU	34.415	0,52	30.895	0,47	65.310	0,99
	BENGKALIS	38.925	0,59	38.370	0,58	77.295	1,18
	INDRAGIRI HILIR	43.132	0,66	39.696	0,60	82.828	1,26
	PELALAWAN	27.477	0,42	24.877	0,38	52.354	0,80
	ROKAN HULU	43.089	0,66	38.875	0,59	81.964	1,25
	ROKAN HILIR	52.399	0,80	47.311	0,72	99.710	1,52
	SIAK	31.670	0,48	29.621	0,45	61.291	0,93
	KUANSING	27.081	0,41	24.755	0,38	51.836	0,79
	KEP. MERANTI	12.417	0,19	10.545	0,16	22.962	0,35
	KOTA PEKANBARU	57.108	0,87	57.059	0,87	114.167	1,74
	KOTA DUMAI	17.440	0,27	16.433	0,25	33.873	0,52
TOTAL		**451.086**	**6,86**	**419.347**	**6,38**	**870.433**	**13,24**
SLTA/SEDERAJAT	KAMPAR	86.438	1,31	73.565	1,12	160.003	2,43
	INDRAGIRI HULU	42.754	0,65	35.257	0,54	78.011	1,19
	BENGKALIS	81.463	1,24	65.588	1,00	147.051	2,24
	INDRAGIRI HILIR	45.045	0,69	38.613	0,59	83.658	1,27
	PELALAWAN	43.735	0,67	34.803	0,53	78.538	1,19
	ROKAN HULU	45.340	0,69	37.960	0,58	83.300	1,27
	ROKAN HILIR	63.221	0,96	52.070	0,79	115.291	1,75
	SIAK	49.348	0,75	39.465	0,60	88.813	1,35
	KUANSING	32.628	0,50	27.204	0,41	59.832	0,91
	KEP. MERANTI	15.836	0,24	14.216	0,22	30.052	0,46
	KOTA PEKANBARU	160.142	2,44	151.412	2,30	311.554	4,74
	KOTA DUMAI	37.916	0,58	32.270	0,49	70.186	1,07
TOTAL		**703.866**	**10,71**	**602.423**	**9,16**	**1.306.289**	**19,87**
DIPLOMA I/II	KAMPAR	1.709	0,03	3.766	0,06	5.475	0,08
	INDRAGIRI HULU	905	0,01	1.742	0,03	2.647	0,04
	BENGKALIS	1.026	0,02	2.579	0,04	3.605	0,05
	INDRAGIRI HILIR	1.358	0,02	2.248	0,03	3.606	0,05
	PELALAWAN	804	0,01	1.582	0,02	2.386	0,04
	ROKAN HULU	1.037	0,02	1.933	0,03	2.970	0,05
	ROKAN HILIR	745	0,01	1.672	0,03	2.417	0,04

TINGKAT PENDIDIDIKAN AKHIR	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
	SIAK	753	0,01	1.792	0,03	2.545	0,04
	KUANSING	832	0,01	1.630	0,02	2.462	0,04
	KEP. MERANTI	539	0,01	768	0,01	1.307	0,02
	KOTA PEKANBARU	2.858	0,04	6.513	0,10	9.371	0,14
	KOTA DUMAI	498	0,01	1.105	0,02	1.603	0,02
TOTAL		**13.064**	**0,20**	**27.330**	**0,42**	**40.394**	**0,61**
AKADEMI/ DIPLOMA III/SARJANA MUDA	KAMPAR	2.729	0,04	5.822	0,09	8.551	0,13
	INDRAGIRI HULU	1.132	0,02	2.856	0,04	3.988	0,06
	BENGKALIS	3.763	0,06	6.245	0,09	10.008	0,15
	INDRAGIRI HILIR	1.434	0,02	2.702	0,04	4.136	0,06
	PELALAWAN	1.348	0,02	2.553	0,04	3.901	0,06
	ROKAN HULU	1.517	0,02	3.396	0,05	4.913	0,07
	ROKAN HILIR	1.586	0,02	3.765	0,06	5.351	0,08
	SIAK	1.445	0,02	2.987	0,05	4.432	0,07
	KUANSING	1.067	0,02	2.389	0,04	3.456	0,05
	KEP. MERANTI	668	0,01	1.092	0,02	1.760	0,03
	KOTA PEKANBARU	9.832	0,15	16.799	0,26	26.631	0,41
	KOTA DUMAI	2.175	0,03	3.613	0,05	5.788	0,09
TOTAL		**28.696**	**0,44**	**54.219**	**0,82**	**82.915**	**1,26**
DIPLOMA IV/STRATA I	KAMPAR	12.450	0,19	14.998	0,23	27.448	0,42
	INDRAGIRI HULU	6.091	0,09	7.933	0,12	14.024	0,21
	BENGKALIS	11.264	0,17	14.551	0,22	25.815	0,39
	INDRAGIRI HILIR	6.810	0,10	8.064	0,12	14.874	0,23
	PELALAWAN	5.697	0,09	6.570	0,10	12.267	0,19
	ROKAN HULU	5.844	0,09	7.246	0,11	13.090	0,20
	ROKAN HILIR	5.735	0,09	6.939	0,11	12.674	0,19
	SIAK	6.186	0,09	8.013	0,12	14.199	0,22
	KUANSING	5.431	0,08	6.862	0,10	12.293	0,19
	KEP. MERANTI	2.386	0,04	2.889	0,04	5.275	0,08
	KOTA PEKANBARU	43.145	0,66	46.856	0,71	90.001	1,37
	KOTA DUMAI	5.218	0,08	6.186	0,09	11.404	0,17
TOTAL		**116.257**	**1,77**	**137.107**	**2,09**	**253.364**	**3,85**
STRATA-II	KAMPAR	845	0,01	484	0,01	1.329	0,02
	INDRAGIRI HULU	351	0,01	208	0,00	559	0,01
	BENGKALIS	571	0,01	365	0,01	936	0,01
	INDRAGIRI HILIR	455	0,01	289	0,00	744	0,01
	PELALAWAN	306	0,00	198	0,00	504	0,01
	ROKAN HULU	357	0,01	234	0,00	591	0,01
	ROKAN HILIR	200	0,00	145	0,00	345	0,01

TINGKAT PENDIDIDIKAN AKHIR	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%	n (Jiwa)	%
	SIAK	255	0,00	158	0,00	413	0,01
	KUANSING	367	0,01	223	0,00	590	0,01
	KEP. MERANTI	125	0,00	47	0,00	172	0,00
	KOTA PEKANBARU	5.000	0,08	3.593	0,05	8.593	0,13
	KOTA DUMAI	274	0,00	195	0,00	469	0,01
TOTAL		**9.106**	**0,14**	**6.139**	**0,09**	**15.245**	**0,23**
STRATA-III	KAMPAR	46	0,00	26	0,00	72	0,00
	INDRAGIRI HULU	7	0,00	15	0,00	22	0,00
	BENGKALIS	11	0,00	13	0,00	24	0,00
	INDRAGIRI HILIR	28	0,00	29	0,00	57	0,00
	PELALAWAN	20	0,00	15	0,00	35	0,00
	ROKAN HULU	12	0,00	13	0,00	25	0,00
	ROKAN HILIR	11	0,00	17	0,00	28	0,00
	SIAK	19	0,00	19	0,00	38	0,00
	KUANSING	12	0,00	2	0,00	14	0,00
	KEP. MERANTI	8	0,00	4	0,00	12	0,00
	KOTA PEKANBARU	371	0,01	169	0,00	540	0,01
	KOTA DUMAI	9	0,00	4	0,00	13	0,00
TOTAL		**554**	**0,01**	**326**	**0,00**	**880**	**0,01**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Penduduk Provinsi Riau dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan per Kabupaten/Kota, dapat diketahui sebagai berikut:

- Penduduk berpendidikan terakhir tamat SD/Sederajat terbesar terdapatdi Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 181.421 orang, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Dumai sebesar 44.942 orang.
- Penduduk berpendidikan terakhir tamat SLTP/Sederajat terbesar di Kabupaten Kampar sebanyak 126.843 orang dan yang paling sedikit Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 22.962 orang.
- Penduduk berpendidikan terakhir tamat SLTA/Sederajat, Diploma I/II, Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Diploma IV/Strata I, Strata II dan Strata III terbesar adalah Kota Pekanbaru dan yang paling sedikit Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk Kota

Pekanbaru yang besar dan sedikitnya Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti.

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejumlah agama di Indonesia berpengaruh terhadap, ekonomi dan budaya. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada.

Negara memberikan kebebasan bagi semua penduduknya untuk memilih agama sesuai dengan keyakinannya. Kebebasan memilih tersebut merupakan Hak Asasi Manusia dan karena itu dilindungi oleh Negara. Tidak diperbolehkan seseorang atau sekelompok orang memaksakan kehendaknya terhadap orang lain untuk memilih agama tertentu. Berdasarkan Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama pasal 1, "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk di Provinsi Riau berdasarkan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel III.18

Jumlah Penduduk Menurut Agama Per Kabupaten/Kota

Se Provinsi Riau Tahun 2021

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	AGAMA							JUMLAH
		ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KHONG HUCU	KEPERCA YAAN	
1401	KAMPAR	730.004	78.078	8.058	55	337	3	31	816.566
1402	INDRAGIRI HULU	405.376	34.776	6.723	3	1.206	13	342	448.439
1403	BENGKALIS	511.779	74.226	6.968	31	30.938	179	110	624.231
1404	INDRAGIRI HILIR	654.266	8.158	857	20	4.334		37	667.672
1405	PELALAWAN	317.992	69.152	6.214	63	2.149	31	46	395.647
1406	ROKAN HULU	472.515	80.214	7.706	5	251	1	55	560.747
1407	ROKAN HILIR	569.620	59.501	5.217	76	14.551	146	101	649.212
1408	SIAK	376.115	71.257	7.259	195	4.244	116	125	459.311
1409	KUANTAN SINGINGI	322.056	15.118	1.673	5	463		18	339.333
1410	KEP.MERANTI	178.929	3.036	219	21	27.022	1.024	156	210.407
1471	KOTA PEKANBARU	908.822	108.818	16.098	246	40.901	33	71	1.074.989
1472	KOTA DUMAI	278.833	35.785	2.875	47	10.146	658	34	328.378
14	**RIAU**	**5.726.307**	**638.119**	**69.867**	**767**	**136.542**	**2.204**	**1.126**	**6.574.932**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Tabel III.19

Jumlah Penduduk Menurut Agama Berdasarkan Jenis Kelamin

Se Provinsi Riau Tahun 2021

NO. URUT	AGAMA	JENIS KELAMIN					
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH	
		N(JIWA)	%	N(JIWA)	%	N(JIWA)	%
1.	ISLAM	2.924.166	44,47	2.802.141	42,62	5.726.307	87,09
2.	KRISTEN	328.627	5	309.492	4,71	638.119	9,71
3.	KATHOLIK	35.847	0,55	34.020	0,52	69.867	1,06
4.	HINDU	402	0,01	365	0,01	767	0,01
5.	BUDDHA	69.520	1,06	67.022	1,02	136.542	2,08
6.	KHONGHUCU	1.136	0,02	1.068	0,02	2.204	0,03
7.	KEPERCAYAAN THD TUHAN YME	589	0,01	537	0,01	1.126	0,02
JUMLAH		**3.360.287**	**51,11**	**3.214.645**	**48,89**	**6.574.932**	**100**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa hampir semua agama tersebar di Kabupaten/Kota, kecuali agama Khonghucu tidak terdapat di kabupaten Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi. Mayoritas penduduk Riau adalah

agama Islam sebesar 87,09persen dari jumlah penduduk yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.

Gambar III.6
Jumlah Penduduk Menurut Agama di Provinsi Riau
Tahun 2021

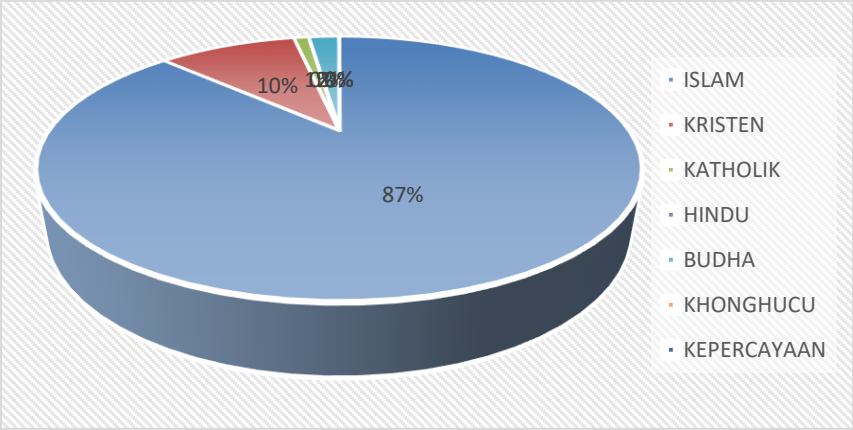

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

d. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam memberikan program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat. Selama ini perhatian pemerintah dianggap kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini.

Berbagai kantor pelayanan publik belum ramah penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Informasi jumlah penyandang cacat terutama cacat fisik dapat digunakan untuk dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas penddikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Data SIAK mencakup data tentang penyandang cacat ini.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk Provinsi Riau per Kabupaten/Kota menurut kecacatan sebagai berikut :

Tabel. III.20
Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan per Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JENIS KECACATAN						JUMLAH
		FISIK	NETRA	RUNGU	MENTAL	FISIK/ MENTAL	LAIN	
1401	KAMPAR	190	30	155	186	17	35	**613**
1402	INDRAGIRI HULU	48	28	56	26	11	31	**200**
1403	BENGKALIS	180	26	46	52	19	20	**343**
1404	INDRAGIRI HILIR	34	12	20	7	5	13	**91**
1405	PELALAWAN	23	21	28	16	13	22	**123**
1406	ROKAN HULU	56	30	67	47	22	23	**245**
1407	ROKAN HILIR	36	15	37	35	10	33	**166**
1408	SIAK	53	14	35	19	15	35	**171**
1409	KUANTAN SINGINGI	20	17	14	9	4	13	**77**
1410	KEPULAUAN MERANTI	15	21	20	31	15	767	**869**
1471	KOTA PEKANBARU	109	80	101	67	24	50	**431**
1472	KOTA DUMAI	48	15	36	27	8	13	**147**
14	**RIAU**	**812**	**309**	**615**	**522**	**163**	**1.055**	**3476**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah penduduk cacat di Provinsi Riau berjumlah 3.476 jiwa. Jumlah penduduk cacat terbesar adalah di Kepulauan Meranti yaitu 869 jiwa.

Sedangkan untuk jenis kecacatan terbesar adalah cacat lainnya sebesar 1.055 jiwa dan cacat fisik sebesar 812 jiwa. Meskipun proporsinya kecil, penduduk penyandang cacat tetap harus menjadi perhatian Pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan sosial bagi mereka seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas layanan umum lainnya.

Jika dikaitkan dengan golongan umur dan jenis kecacatan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel. III.21
Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan Berdasarkan Umur
di Provinsi Riau Tahun 2021

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KECACATAN						JUMLAH
		FISIK	NETRA	RUNGU	MENTAL	FISIK & MENTAL	LAINNYA	
1	00-04	5					7	12
2	05-09	9	3	1	1	1		15
3	10-14	39	7	8	19	7	23	103
4	15-19	54	9	32	54	19	42	210
5	20-24	76	19	72	64	13	51	295
6	25-29	60	23	83	63	26	60	315
7	30-34	70	23	82	74	19	84	352
8	35-39	96	26	88	48	16	104	378
9	40-44	103	41	76	53	17	140	430
10	45-49	98	47	58	42	13	137	395
11	50-54	60	37	53	28	8	103	289
12	55-59	45	28	30	29	15	95	242
13	60-64	46	13	12	22	6	64	163
14	65-69	27	10	10	15		60	122
15	70-74	10	9	3	4	1	36	63
16	>=75	14	14	7	6	2	49	92
JUMLAH		812	309	615	522	163	1.055	3.476

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Penyandang cacat terbanyak di Provinsi Riau bila dilihat dari kelompok umur sebagian besar berada pada kelompok umur produktif, sehingga harus dilihat penyebab kecacatan tersebut apakah bawaan lahir atau penyebab lain agar dapat dicarikan solusinya.

5. Kelahiran

a. Jumlah Kelahiran

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami.

Kegunaan jumlah kelahiran adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para

perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Berikut ini dapat dilihat jumlah Kelahiran diProvinsi Riau per Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel. III.22

Jumlah Kelahiran Bayi di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN
1401	KAMPAR	16.703
1402	INDRAGIRI HULU	7.954
1403	BENGKALIS	10.410
1404	INDRAGIRI HILIR	11.357
1405	PELALAWAN	10.907
1406	ROKAN HULU	15.096
1407	ROKAN HILIR	14.448
1408	SIAK	10.144
1409	KUANTAN SINGINGI	5.324
1410	KEP. MERANTI	2.787
1471	KOTA PEKANBARU	19.609
1472	KOTA DUMAI	5.912
14	**RIAU**	**130.651**

Sumber: Dinas Kesehatan dan Olahan Data Konsolidasi Tahun 2021

Jumlah kelahiran di Provinsi Riau Tahun 2021 tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 19.609 jiwa dan Kabupaten Kampar 16.703 jiwa, sedangkan Kabupaten terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 2.787 jiwa. Jumlah kelahiran ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk dan wanita usia subur (WUS).

b. Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar atau Crude Birth Rate (CBR) menunjukkan jumlah bayi yang lahir setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun. Untuk mencari angka kelahiran kasar digunakan rumus sebagai berikut:

$$CBR = \frac{L}{P} \times 1000$$

Dimana :

CBR = angka kelahiran kasar

L = jumlah kelahiran selama satu tahun

P = jumlah penduduk pertengahan tahun

Pada dasarnya angka kelahiran kasar juga digolongkan menjadi tiga kategori. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar saat dilakukannya praktik dapat memudahkan penelitian. Adapun golongan tersebut meliputi:

1. golongan tinggi, apabila jumlah kelahiran lebih dari 30.
2. golongan sedang, apabila jumlah kelahiran antara 20 - 30.
3. golongan rendah, apabila jumlah kelahiran kurang dari 20.

Berikut ini dapat dilihat Angka Kelahiran Kasar (CBR) di Provinsi Riau per Kabupaten/Kotasebagai berikut :

Tabel. III.23

Angka Kelahiran Kasar di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KELAHIRAN	ANGKA KELAHIRAN KASAR
1401	KAMPAR	816.566	16.703	20,46
1402	INDRAGIRI HULU	448.439	7.954	17,74
1403	BENGKALIS	624.231	10.410	16,68
1404	INDRAGIRI HILIR	667.672	11.357	17,01
1405	PELALAWAN	395.647	10.907	27,57
1406	ROKAN HULU	560.747	15.096	26,92
1407	ROKAN HILIR	649.212	14.448	22,25
1408	SIAK	459.311	10.144	22,09
1409	KUANTAN SINGINGI	339.333	5.324	15,69
1410	KEP. MERANTI	210.407	2.787	13,25
1471	KOTA PEKANBARU	1.074.989	19.609	18,24
1472	KOTA DUMAI	328.378	5.912	18,00
14	**RIAU**	**6.574.932**	**130.651**	**19,87**

Sumber: Dinas Kesehatan dan Olahan Data Konsolidasi Tahun 2021

Jumlah kelahiran di Provinsi Riau sebesar 130.651 kelahiran sehingga menghasilkan angka kelahiran Kasar sebesar 19,87 per 1000 penduduk. Ini artinya setiap 1000 penduduk ada 20 kelahiran. Angka ini tergolong sedang karena masih berkisaran 20 sampai 30.

Angka kelahiran tertinggi ada di Kabupaten Pelalawan sebesar 27,57 per 1000 penduduk, sedangkan angka kelahiran terendah ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan angka kelahiran 13,25.

II. KUALITAS PENDUDUK

Kualitas Penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non fisik yang dibarengi dengan tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Pengertian kualitas penduduk sangat terkait dengan kemampuan penduduk untuk dapat mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya, guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraannya. Indikator kualitas atau mutu dari sumber daya manusia dapat dilihat dari beberapa aspek seperti; tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ekonomi dan sosial.

A. KESEHATAN

Kesehatan merupakan harta tak ternilai dan merupakan modal berharga bagi seseorang untuk memulai aktivitasnya. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatannya.Ada pepatah

mengatakan "men sana in corpore sano" yang terjemahan bebasnya mengandung makna bahwa dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

Kualitas penduduk dipengaruhi oleh tingkat kesehatan. Hal ini dapat dipahami, sebab apalah artinya penduduk dengan kuantitas banyak, tingkat pendidikan tinggi, tetapi tingkat kesehatannya rendah dan sakit-sakitan, tetap saja produktivitasnya rendah. Indikator tingkat kesehatan penduduk di suatu negara dapat dilihat dari angka kematian dan angka harapan hidup. Angka kematian yang tinggi menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah, sedangkan angka harapan hidup yang tinggi menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang baik.

1. Kelahiran

Kelahiran atau Fertilitas merupakan kemampuan berproduksi yang sebenarnya dari penduduk (actual reproduction performance), atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok perempuan. Kelahiran yang dimaksud disini hanya mencakup kelahiran hidup, jadi bayi yang dilahirkan menunjukan tanda-tanda hidup meskipun hanya sebentar dan terlepas dari lamanya bayi itu dikandung.

a. Angka Kelahiran Umum

Angka kelahiran umum atau General Fertility Rate (GFR) adalah banyaknya kelahiran tiap 1.000 wanita yang berusia 15 - 49 tahun pada pertengahan tahun. Angka kelahiran umum dapat diketahui dengan rumus.

$$GFR = \frac{L}{W(15-49)} \times 1000$$

Dimana :

L = banyaknya kelahiran selama satu tahun

W(15 - 49) = banyaknya penduduk wanita yang berumur 15 – 49 Tahun

Tabel III.24

Angka Kelahiran di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WANITA (15 - 49 THN)	JUMLAH KELAHIRAN	ANGKA KELAHIRAN
1401	KAMPAR	226.125	16.703	73,87
1402	INDRAGIRI HULU	122.596	7.954	64,88
1403	BENGKALIS	170.146	10.410	61,18
1404	INDRAGIRI HILIR	185.173	11.357	61,33
1405	PELALAWAN	109.822	10.907	99,32
1406	ROKAN HULU	159.133	15.096	94,86
1407	ROKAN HILIR	178.159	14.448	81,10
1408	SIAK	128.906	10.144	78,69
1409	KUANTAN SINGINGI	93.041	5.324	57,22
1410	KEP. MERANTI	56.312	2.787	49,49
1471	KOTA PEKANBARU	305.327	19.609	64,22
1472	KOTA DUMAI	89.217	5.912	66,27
14	**RIAU**	**1.823.957**	**130.651**	71,63

Sumber: Dinas Kesehatan dan Olahan Data Konsolidasi Tahun 2021

Jumlah kelahiran di Provinsi Riau sebesar 130.651 kelahiran dengan jumlah penduduk wanita usia antara 15 – 49 tahun sebesar 1.823.957 penduduk, sehingga menghasilkan angka kelahiran umum sebesar 71,63 per 1000 penduduk wanita usia 15 – 49 tahun yang artinya terdapat 72 kelahiran per 1000 penduduk wanita usia 15 -49 tahun. Dimana angka kelahiran tertinggi terdapat di Kabupaten Pelalawan sebesar 99,32 dan angka kelahiran terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan angka kelahiran 57,73 yang artinya terdapat 49,49 kelahiran dalam 1000 penduduk wanita usia 15 – 49 tahun.

b. Rasio Anak dan Perempuan Usia Subur

Rasio anak dan perempuan adalah perbandingan antara anakdi bawah usia lima tahun dengan jumlah penduduk perempuan Usia Subur (15-49 tahun) disuatu wilayah dan waktu tertentu. Rasio anak dan perempuan bisa digunakan untuk melihat jumlah kelahiran yang terjadi selama 5 tahun yang lalu.

Berikut Ini dapat dilihat tabel Rasio anak usia 0-4 tahun dengan perempuan usia produktif 15 -49 tahun sebagai berikut :

Tabel III.25
Rasio Anak dengan Wanita Usia Subur di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	PEREMPUAN (15-49 THN)	ANAK (0-4 THN)	RASIO ANAK DAN PUS
1401	KAMPAR	226.125	63.763	28,20
1402	INDRAGIRI HULU	122.596	32.880	26,82
1403	BENGKALIS	170.146	50.400	29,62
1404	INDRAGIRI HILIR	185.173	38.767	20,94
1405	PELALAWAN	109.822	32.435	29,53
1406	ROKAN HULU	159.133	37.170	23,36
1407	ROKAN HILIR	178.159	44.724	25,10
1408	SIAK	128.906	34.846	27,03
1409	KUANTAN SINGINGI	93.041	24.157	25,96
1410	KEP. MERANTI	56.312	15.209	27,01
1471	KOTA PEKANBARU	305.327	82.500	27,02
1472	KOTA DUMAI	89.217	27.591	30,93
14	**RIAU**	**1.823.957**	**484.442**	**26,56**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Rasio Anak dengan Perempuan Usia Subur di Provinsi Riau adalah 26,56 bearti dari 100 perempuan usia subur terdapat 27 orang balita. Angka ini mengindikasikan tingkat fertilitas yang masih cukup tinggi karena masih besarnya jumlah anak balita. CWR tertinggi adalah di Kota Dumai, Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Sedangkan rasio terendah terdapat pada Kabupaten Rokan Hilir yaitu dari 100 perempuan usia subur terdapat 21 balita.

Untuk lebih jelasnya rasio wanita usia subur dengan jumlah anakdapat dilihat pada diagram dibawah ini:

c. Jumlah Akseptor Aktif dan Penggunaan Metode KB

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya jumlah penduduk besar dengan Laju Pertumbuhan Penduduk yang relatif tinggi, tetapi juga penyebaran penduduk yang tidak merata, struktur umur yang muda dan kualitas penduduk yang masih rendah.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi masalah laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan program Keluarga Berencana (KB) yang berguna untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta mampu menciptakan keluarga yang berkualitas dan sejahtera dengan tingkat kelahiran dapat terkendali.

Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang dicanangkan pemerintah dalam upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan

sejahtera. Pemerintah menawarkan macam-macam alat kontrasepsi yang ada dan dapat digunakan oleh masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB). Macam-macam alat kontrasepsi, antara lain Suntik, Obat/Pil KB, Intra Uterine Device (IUD)/Spiral, Pil, Kondom, Suntikan, implant, MOP(Vasektomi) dan MOW (Tubektomi).

Berikut ini dapat dilihat Tabel Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 :

Tabel III.26
Jumlah Akseptor Aktif Keluarga Berencana Menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi Per Kabupaten Kota di Provinsi Riau Tahun 2021

KODE KAB	KABUPATEN/KOTA	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIK	PIL	JUMLAH
14.01	KAMPAR	4.652	2.721	185	4.173	21.082	70.987	38.422	142.222
14.02	INDRAGIRI HULU	3.191	1.118	72	3.093	10.822	29.668	12.604	60.568
14.03	BENGKALIS	3.674	2.109	702	2.419	5.977	41.712	16.623	73.216
14.04	INDRAGIRI HILIR	3.231	435	380	2.721	8.449	31.558	63.050	109.824
14.05	PELALAWAN	10.568	1.692	123	3.620	9.931	21.716	15.137	62.787
14.06	ROKAN HULU	2.844	1.254	190	3.440	9.107	22.597	15.848	55.280
14.07	ROKAN HILIR	7.524	1.323	-	6.052	6.317	39.738	20.506	81.460
14.08	SIAK	6.920	1.520	71	3.724	7.683	23.367	15.541	58.826
14.09	KUANTAN SINGINGI	2.627	763	255	1.978	6.859	22.337	11.932	46.751
14.10	KEP. MERANTI	6.314	3.817	30	1.446	2.204	9.574	3.621	27.006
14.71	KOTA PEKANBARU	14.102	4.226	359	10.348	10.747	39.298	30.705	109.785
14.72	KOTA DUMAI	1.901	1.511	71	3.031	4.596	16.502	6.863	34.475
14	**PROVINSI RIAU**	**67.548**	**22.489**	**2.438**	**46.045**	**103.774**	**369.054**	**250.852**	**862.200**

Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau

Penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi Riau sebanyak 862.200 akseptor dengan Kabupaten/Kota terbanyak terdapat di Kab. Kampar sebesar 142.222 akseptor dan yang paling sedikit adalah kabupaten Kepulauan Meranti yaitu 27.006 akseptor. Adapun alat kontrasepsi paling banyak digunakan adalah jenis suntikan sebesar 369.054 akseptor, kemudian Pil sebanyak 250.852 akseptor.

Berikut ini dapat dilihat diagram Metode KB yang digunakan pada Pasangan Usia Subur di Provinsi Riau Tahun 2021 :

Gambar III.8
Metode KB yang digunakan pada Pasangan Usia Subur
di Provinsi Riau Tahun 2021

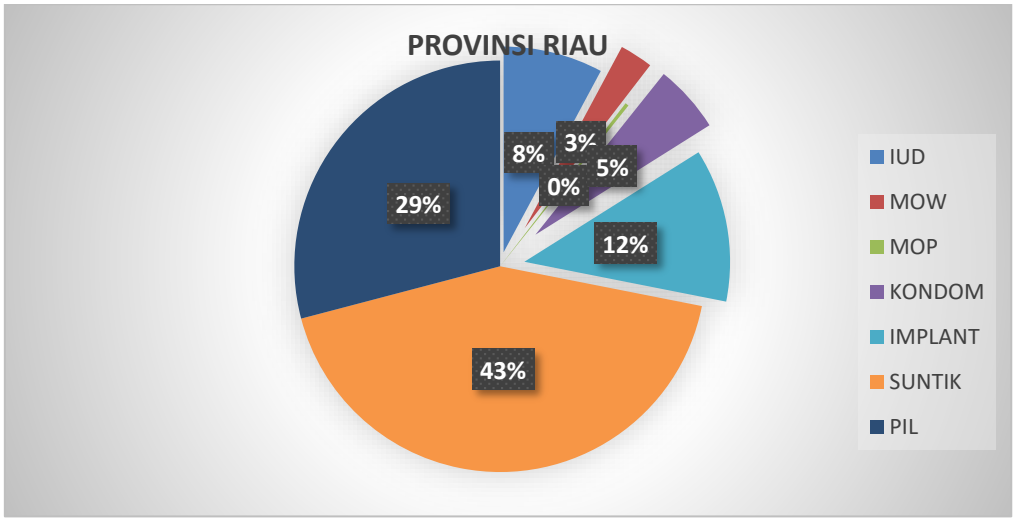

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau

Berdasarkan Gambar III.8 dapat dilihat bahwa Pasangan Usia Subur paling banyak menggunakan metode KB Suntik sebesar 43 persen dan obat/Pil KB sebanyak 29 persen. Sedangkan untuk metode MOP (Vasektomi) dan MOW (Tubektomi) sangat sedikit yang menggunakan.

2. Kematian

Angka kematian adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian per seribu penduduk per tahun. Kematian merupakan salah satu variabel dalam demografi yang mengurangi kuantitas penduduk. Ada dua macam angka kematian, yaitu angka kematian kasar dan angka kematian khusus (angka kematian menurut umur). Angka kematian disebut juga mortalitas.

Kejadiaan kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan

program pembangunan kesehatan lainnya. Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum dipengaruhi erat dengan tingkat kesakitan golongan bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas).

a. Jumlah Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak. Angka kematian bayi juga merupakan indikator untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Berikut Ini dapat dilihat tabel angka kematian bayi di Provinsi Riau tahun 2017sebagai berikut :

Tabel III.27
Jumlah Kematian Bayi di Kabupaten/Kota
se Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	ANGKA KEMATIAN BAYI	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP
1401	KAMPAR	32	16.703
1402	INDRAGIRI HULU	48	7.954
1403	BENGKALIS	53	10.410
1404	INDRAGIRI HILIR	66	11.357
1405	PELALAWAN	18	10.907
1406	ROKAN HULU	46	15.096
1407	ROKAN HILIR	28	14.448
1408	SIAK	49	10.144
1409	KUANTAN SINGINGI	39	5.324
1410	KEP. MERANTI	37	2.787
1471	KOTA PEKANBARU	118	19.609
1472	KOTA DUMAI	87	5.912
14	**RIAU**	**621**	**130.651**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Ket: Jumlah Kematian tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

Jumlah Kematian Bayi Provinsi Riau tahun 2021 adalah 130.651 jiwa. Jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Kota Pekanbaru 19.609, sedangkan jumlah kematian bayi terendah adalah Kabupaten Kepualuan Meranti 2.787 jiwa.

b. Jumlah Kematian Neonatal

Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulanpertama (dinyatakan dengan per seribukelahiran hidup) setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktoryang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Oleh karena kematian neonatal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka angka ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal yang

bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil,misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus.

Berikut ini dapat dilihat jumlah kematian Neonatal di Provinsi Riau Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel III.28
Jumlah Kematian Neonatal di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN NEONATAL	JUMLAH LAHIR HIDUP
1401	KAMPAR	25	16.703
1402	INDRAGIRI HULU	40	7.954
1403	BENGKALIS	49	10.410
1404	INDRAGIRI HILIR	53	11.357
1405	PELALAWAN	18	10.907
1406	ROKAN HULU	43	15.096
1407	ROKAN HILIR	19	14.448
1408	SIAK	41	10.144
1409	KUANTAN SINGINGI	28	5.324
1410	KEP. MERANTI	34	2.787
1471	KOTA PEKANBARU	101	19.609
1472	KOTA DUMAI	46	5.912
14	**RIAU**	**497**	**130.651**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Ket: Jumlah Kematian tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

Jumlah kematian Neonatal di Provinsi Riau tahun 2021 adalah 497 jiwa, tertinggi ada Kota Pekanbaru yaitu sejumlah 101 jiwa dan terendah ada di Kabupaten Pelalawan yaitu 18 jiwa.

c. Jumlah Kematian Balita

Akaba adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1000 kelahiran hidup. Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 71 – 140 sedang dan < 20 rendah.

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Akaba kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Tabel III.29
Jumlah Kematian Balita di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN BALITA	JUMLAH LAHIR HIDUP
1401	KAMPAR	32	16.703
1402	INDRAGIRI HULU	48	7.954
1403	BENGKALIS	53	10.410
1404	INDRAGIRI HILIR	66	11.357
1405	PELALAWAN	18	10.907
1406	ROKAN HULU	46	15.096
1407	ROKAN HILIR	28	14.448
1408	SIAK	49	10.144
1409	KUANTAN SINGINGI	39	5.324
1410	KEP. MERANTI	37	2.787
1471	KOTA PEKANBARU	118	19.609
1472	KOTA DUMAI	87	5.912
14	**RIAU**	**621**	**130.651**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau
Ket: Jumlah Kematian tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi

Jumlah Kematian Balita Provinsi Riau 621 jiwa. Jumah kematian balita pada Provinsi Riau tertinggi ada di Kota Pekanbaru sebesar 118 jiwa dan terendah ada di Kabupaten Pelalawan yaitu 18 jiwa.

d. Jumlah Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lain-lain. Kematian ibu juga mempunyai pengertian kematian dari setiap wanita waktu hamil, persalinan,dan dalam 90 hari sesudah

berakhirnya kehamilan oleh sebab apapun, tanpa memeperhitungkan tuanya kehamilan dan tindakan yang dilakukan untuk mengakhiri kehamilan.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran.

Informasi mengenai tingginya MMR akan bermanfaat untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (making pregnancy safer), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

Tabel III.30
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEMATIAN IBU	JUMLAH LAHIR HIDUP
1401	KAMPAR	7	16.703
1402	INDRAGIRI HULU	12	7.954
1403	BENGKALIS	20	10.410
1404	INDRAGIRI HILIR	17	11.357
1405	PELALAWAN	8	10.907
1406	ROKAN HULU	14	15.096
1407	ROKAN HILIR	18	14.448
1408	SIAK	22	10.144
1409	KUANTAN SINGINGI	11	5.324
1410	KEP. MERANTI	7	2.787
1471	KOTA PEKANBARU	22	19.609
1472	KOTA DUMAI	22	5.912
14	**RIAU**	**180**	**130.651**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Riau yaitu 180 jiwa. Jumlah tertinngi terdapat di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai sebenyak 22 jiwa, sedangkan Kabupaten terendah adalah Kabupaten Kampar dam Kepulauan Meranti sebanyak 7 jiwa.

Tabel III.31
Jenis Kematian Ibu di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JENIS KEMATIAN IBU			JUMLAH KEMATIAN IBU
		JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU	
1401	KAMPAR	2	0	5	7
1402	INDRAGIRI HULU	4	3	5	12
1403	BENGKALIS	6	4	10	20
1404	INDRAGIRI HILIR	5	9	3	17
1405	PELALAWAN	4	1	3	8
1406	ROKAN HULU	6	2	6	14
1407	ROKAN HILIR	6	3	9	18
1408	SIAK	5	2	15	22
1409	KUANTAN SINGINGI	2	0	9	11
1410	KEP. MERANTI	3	2	2	7
1471	KOTA PEKANBARU	7	2	13	22
1472	KOTA DUMAI	6	2	14	22
14	**RIAU**	56	30	94	180

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau

B. PENDIDIKAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan juga mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Bukan hanya berpengaruh terhadap produktivitas tetapi juga berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih bisa cepat mengerti dan siap akan menghadapi perubahan. Pendidikan secara luas diartikan suatu proses pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 masalah pendidikan secara tersirat telah dinyatakan dalam pembukaan, bahwa salah satu tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian diperkuat dalam

pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pengajaran.

Seiring dengan semakin maju perkembangan dunia setiap bangsa di dunia tidak mungkin dapat terhindarkan. la akan berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan ini juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dalam pengelolaan pendidikan pemerintah harus memberikan perhatian khusus.

Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk.

1. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD.

Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut cepat masuk sekolah.

Tabel III.32
Angka Partisipasi Kasar di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	PESERTA DIDIK KESELURUHAN			JUMLAH PENDUDUK			ANGKA PARTISIPASI KASAR		
		SD	SMP	SMA	07-12	13-15	16-18	SD	SMP	SMA
1401	KAMPAR	109.467	49.599	38.304	84.361	61.359	72.177	129,76	80,83	53,07
1402	INDRAGIRI HULU	62.034	25.880	21.409	49.227	33.406	36.505	126,02	77,47	58,65
1403	BENGKALIS	81.660	36.594	32.732	63.677	54.350	54.266	128,24	67,33	60,32
1404	INDRAGIRI HILIR	88.851	37.243	28.849	66.841	51.289	59.029	132,93	72,61	48,87
1405	PELALAWAN	56.546	21.363	17.371	45.261	31.972	32.368	124,93	66,82	53,67
1406	ROKAN HULU	78.055	32.847	26.452	63.648	56.286	50.530	122,64	58,36	52,35
1407	ROKAN HILIR	94.100	41.710	34.391	73.369	60.285	58.611	128,26	69,19	58,68
1408	SIAK	63.488	28.617	24.578	49.893	40.373	41.608	127,25	70,88	59,07
1409	KUANTAN SINGINGI	42.172	18.967	16.394	34.032	27.444	29.169	123,92	69,11	56,20
1410	KEP. MERANTI	22.583	10.236	9.009	18.370	19.119	18.201	122,93	53,54	49,50
1471	KOTA PEKANBARU	128.822	59.487	62.878	104.836	83.978	86.787	122,88	70,84	72,45
1472	KOTA DUMAI	40.124	17.543	15.567	34.014	25.925	28.175	117,96	67,67	55,25
14	**RIAU**	**867.902**	**380.086**	**327.934**	**687.529**	**545.786**	**567.426**	**126,23**	**69,64**	**57,79**

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Gambar III. 9
Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Riau Tahun 2021

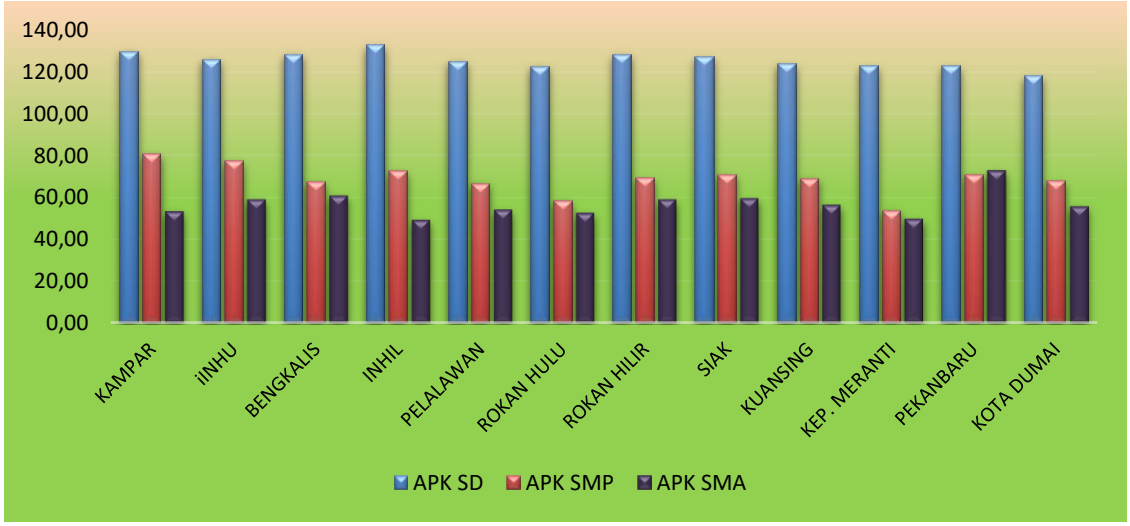

Angka Partisipasi Kasar Provinsi Riau tertinggi adalah tingkat SD/MI, kemudian SMP dan SMA. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar lebih dari 100 persen yang artinya ada murid Sekolah Dasar yang usianya diluar usia sekolah (7-12 tahun), hal ini dikarenakan keterlambatan siswa masuk sekolah dasar, begitu juga untuk tingkat SMP dan SMA Angka Partisipasi Kasarnya sudah baik yaitu untuk tingkat SMP 69,64 persen dan SMA 57,79 persen.

2. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

C. EKONOMI

Pencapaian kesejahteraan merupakan arah cita-cita setiap manusia yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tingkat kesejahteraan penduduk yang berhubungan dengan status ekonomi sebagian besar penduduk di suatu wilayah. Pada umumnya negara-negara berkembang memiliki tingkat pendapatan penduduk lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Kecuali, pada beberapa negara berkembang di kawasan Asia yang memiliki sumber daya minyak dan gas bumi cukup berlimpah, seperti Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Adapun penyebab Negara berkembang memiliki pendapatan per kapita rendah adalah :

1. Pendidikan masyarakat rendah, tidak banyak tenaga ahli, dan lain-lain.
2. Jumlah penduduk banyak.
3. Besarnya angka ketergantungan.

Berdasarkan pendapatan per kapitanya, negara digolongkan menjadi 3, yaitu:

1. Negara kaya, pendapatan per kapitanya > US$ 1.000.
2. Negara sedang, pendapatan per kapitanya = US$ 300 – 1.00.
3. Negara miskin, pendapatan per kapitanya < US$ 300.

Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (kesejahteraan masyarakat), sehingga dapat mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan pemerintah melakukan upaya dalam bentuk:

1. Menekan laju pertumbuhan penduduk.
2. Merangsang kemauan berwiraswasta.
3. Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi.
4. Memperluas kesempatan kerja.
5. Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa.

1. Proporsi, Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan dan untuk mengetahui banyaknya tenaga kerja (penduduk usia kerja)

potensial.Penghitungan persentase tenaga kerja dilaksanakan dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (usia kerja) dengan jumlah penduduk keseluruhan.

Selain tenaga kerja, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam bidang ketenagakerjaan, antara lain angkatan kerja (bekerja dan pencari kerja), bukan angkatan kerja dan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK).

Angkatan Kerja (labor force) adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan (menganggur) atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif.Mereka yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, pensiunan dan/atau yang mendapatkan penghasilan bukan dari bekerja (misalkan warisan dan deposito) serta lainnya (yang berada di rumah sakit dalam waktu lama, di lembaga pemasyarakatan dan sebagainya) tidak termasuk dalam angkatan kerja.Angkatan Kerja dibagi 2 (dua) yaitu bekerja (employed) dan mencari pekerjaan/menganggur (unemployed).

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun.APAK bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Sebelum menampilkan gambaran tentang ketenagakerjaan terlebih dahulu akan ditampilkan tabel kondisi ketenagakerjaan berdasarkan olahan database kependudukan semester II Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.34
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	ANGKATAN KERJA		TENAGA KERJA	BUKAN ANGKATAN KERJA
		BEKERJA	PENCARI KERJA		
1401	KAMPAR	239.080	43.893	282.973	274.697
1402	iINHU	136.653	29.626	166.279	137.093
1403	BENGKALIS	167.735	32.170	199.905	222.907
1404	INHIL	202.022	50.975	252.997	214.837
1405	PELALAWAN	119.732	17.011	136.743	127.217
1406	ROKAN HULU	161.788	48.467	210.255	172.852
1407	ROKAN HILIR	174.702	52.231	226.933	211.860
1408	SIAK	124.224	35.254	159.478	154.753
1409	KUANSING	111.841	14.593	126.434	106.022
1410	KEP. MERANTI	60.351	16.129	76.480	69.168
1471	PEKANBARU	337.903	86.407	424.310	318.896
1472	KOTA DUMAI	86.775	38.064	124.839	95.656
14	**RIAU**	**1.922.806**	**464.820**	**2.387.626**	**2.105.958**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester I Tahun 2021

Jumlah Tenaga Kerja atau penduduk usia 15 – 64 thn di Provinsi Riau Sebesar 4.493.584 jiwa dengan rincian jumlah penduduk bekerja1.922.806 dan pencari kerja 464.820 jiwa yang disebut angkatan kerja, sedangkan penduduk bukan angkatan kerja sebesar 2.105.958 jiwa. Bukan Angkatan kerja yang terdiri dari ibu rumah tangga, pelajar/mahasiswa dan pensiunan.

Gambar III.11
Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Riau

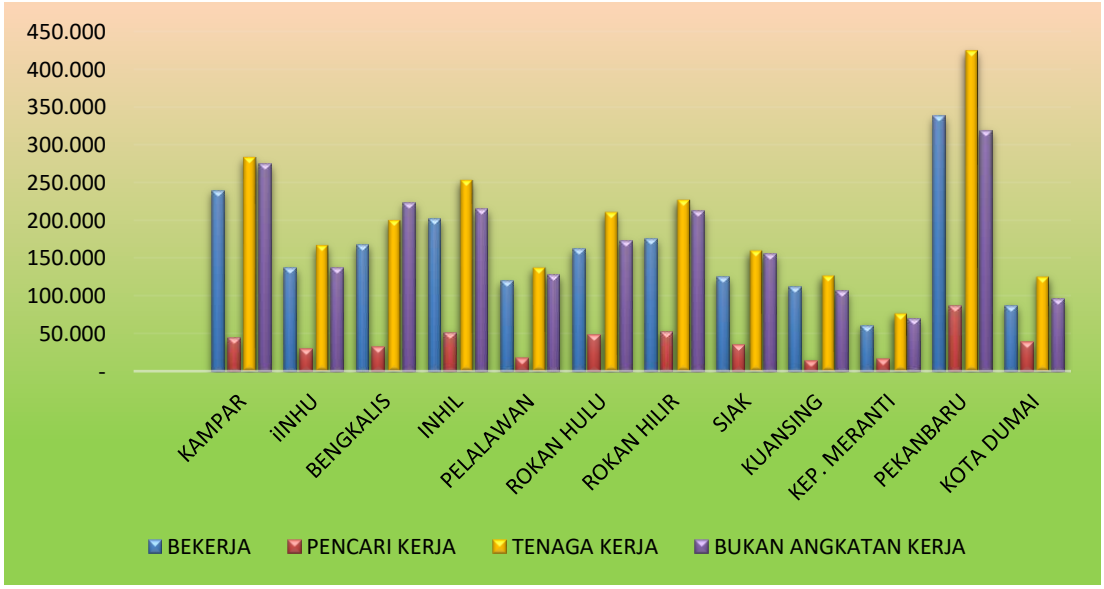

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

a. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Tenaga kerja (manpower) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (15-64 th) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa.

Indikator ini berguna sebagai wacana pengambil kebijakan dalam menyusun rencana ketenagakerjaan. Disamping itu juga untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja (penduduk usia kerja) potensial.

Semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja (kesempatan kerja), maka akan terjadi pengangguran yang cukup besar pula.

Berikut ini dapat dilihat jumlah dan proporsi tenaga kerjadi Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III.35
Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja di Provinsi Riau
Tahun 2020

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	TENAGA KERJA			PERSENTASE
			LK	PR	JUMLAH	
1401	KAMPAR	816.566	283.294	274.376	557.670	68,29
1402	iINHU	448.439	154.537	148.835	303.372	67,65
1403	BENGKALIS	624.231	215.933	206.879	422.812	67,73
1404	INHIL	667.672	240.510	227.324	467.834	70,07
1405	PELALAWAN	395.647	135.522	128.438	263.960	66,72
1406	ROKAN HULU	560.747	194.193	188.914	383.107	68,32
1407	ROKAN HILIR	649.212	223.960	214.833	438.793	67,59
1408	SIAK	459.311	160.745	153.486	314.231	68,41
1409	KUANSING	339.333	117.568	114.888	232.456	68,50
1410	KEP. MERANTI	210.407	75.542	70.106	145.648	69,22
1471	PEKANBARU	1.074.989	370.238	372.968	743.206	69,14
1472	KOTA DUMAI	328.378	112.772	107.723	220.495	67,15
14	**RIAU**	**6.574.932**	**2.284.814**	**2.208.770**	**4.493.584**	**68,34**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

Proporsi tenaga kerja di Provinsi Riau Tahun 2021 adalah 68,34 persen, artinya ada 68,34 persen dari jumlah penduduk yang berusia produktif sehingga harus menjadi perhatian pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja sehingga

tidak terjadi pengangguran. Proporsi tenaga kerja terbesar terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 70,07 persen, sedangkan Kabupaten paling kecil adalah Kabupaten Pelalawan sebesar 66,72 persen.

b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Menganggur

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Pencari Kerja atau Pengangguran Terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran kerja tenaga kerja. Angka pengangguran terbuka berguna sebagai acuan bagi pemerintah dalam kebijakan membuka lapangan kerja baru.

Untuk menghitung tingkat pengangguran dapat dihitung dengan rumus:

$$AngkaPengangguran = \frac{\sum PencariKerja}{\sum Angkatan\,Kerja} \times 100$$

Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Berikut ini dapat dilihat Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel III.36
Angka Pengganggguran Terbuka diProvinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	TENAGA KERJA	ANGKATAN KERJA			ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA
			BEKERJA	PENCARI KERJA	JUMLAH	
1401	KAMPAR	539.842	239.080	43.893	282.973	15,51
1402	iINHU	292.792	136.653	29.626	166.279	17,82
1403	BENGKALIS	404.751	167.735	32.170	199.905	16,09
1404	INHIL	450.284	202.022	50.975	252.997	20,15
1405	PELALAWAN	250.955	119.732	17.011	136.743	12,44
1406	ROKAN HULU	386.742	161.788	48.467	210.255	23,05
1407	ROKAN HILIR	437.311	174.702	52.231	226.933	23,02
1408	SIAK	304.093	124.224	35.254	159.478	22,11
1409	KUANSING	231.047	111.841	14.593	126.434	11,54
1410	KEP. MERANTI	146.534	60.351	16.129	76.480	21,09
1471	PEKANBARU	715.297	337.903	86.407	424.310	20,36
1472	KOTA DUMAI	215.310	86.775	38.064	124.839	30,49
14	**RIAU**	**4.374.958**	**1.922.806**	**464.820**	**2.387.626**	**19,47**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau sebesar 19,47 persen, angka ini menunjukkan bahwa 19,47 persen dari 2.387.626 angkatan kerja di Riau mengganggur atau mencari pekerjaan. Angka tertinggi terdapat di Kota Dumai sebesar 30,49 persen sedangkan terendah terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 11,54 persen. Hal ini harus jadi perhatian Pemerintah dalam mengambil kebijakan.

2. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja menyajikan data yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 thn terhadap penduduk usia 15-64 thn.

Indikator ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang benar-benar terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Berikut ini dapat dilihat Angka Partisipasi Angkatan Kerjadi Provinsi Riau Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.37
Jumlah Angka Partisipasi Angkatan Kerja diProvinsi Riau Tahun 2021

KODE KAB	KABUPATEN /KOTA	ANGKATAN KERJA			JUMLAH BUKAN ANGKER	JUMLAH TENAGA KERJA	APAK
		BEKERJA	PENCARI KERJA	JUMLAH ANGKATAN KERJA			
1401	KAMPAR	239.080	43.893	282.973	274.697	557.670	50,74
1402	iINHU	136.653	29.626	166.279	137.093	303.372	54,81
1403	BENGKALIS	167.735	32.170	199.905	222.907	422.812	47,28
1404	INHIL	202.022	50.975	252.997	214.837	467.834	54,08
1405	PELALAWAN	119.732	17.011	136.743	127.217	263.960	51,80
1406	ROKAN HULU	161.788	48.467	210.255	172.852	383.107	54,88
1407	ROKAN HILIR	174.702	52.231	226.933	211.860	438.793	51,72
1408	SIAK	124.224	35.254	159.478	154.753	314.231	50,75
1409	KUANSING	111.841	14.593	126.434	106.022	232.456	54,39
1410	KEP. MERANTI	60.351	16.129	76.480	69.168	145.648	52,51
1471	PEKANBARU	337.903	86.407	424.310	318.896	743.206	57,09
1472	KOTA DUMAI	86.775	38.064	124.839	95.656	220.495	56,62
14	**RIAU**	**1.922.806**	**464.820**	**2.387.626**	**2.105.958**	**4.493.584**	**53,13**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Riau sebesar 52,13 persen, artinya jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun terdapat 52,13 persen yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi APAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat atau berusaha terlibat dalam kegiatan produktif. Kabupaten/Kota terbesar Angka Partisipasi Angkatan Kerjanya adanya Kota Pekanbaru yaitu sebesar 57,09 persen sedangkan yang terkecil adalah Kabupaten Bengkalis yaitu 47,28 persen.

3. Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan

Dalam database kependudukan, jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan terdapat 89 (delapan puluh Sembilan) jenis pekerjaan, Data ini tersaji mulai dari yang belum bekerja sampai dengan pekerja lainnya.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan jenis pekerjaan sebagai berikut :

Tabel III.38
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan
Di Provinsi Riau Tahun 2021

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		LK	PR	LK+PR
1.	BELUM/TIDAK BEKERJA	1.123.155	1.015.465	2.138.620
2.	MENGURUS RUMAH TANGGA		1.383.050	1.383.050
3.	PELAJAR/MAHASISWA	532.083	443.192	975.275
4.	PENSIUNAN	14.394	5.270	19.664
5.	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	42.615	47.489	90.104
6.	TENTARA NASIONAL INDONESIA	5.820	53	5.873
7.	KEPOLISIAN RI (POLRI)	9.187	522	9.709
8.	PERDAGANGAN	9.395	2.878	12.273
9.	PETANI/PEKEBUN	450.691	72.953	523.644
10.	PETERNAK	438	98	536
11.	NELAYAN/PERIKANAN	22.054	344	22.398
12.	INDUSTRI	240	122	362
13.	KONSTRUKSI	496	35	531
14.	TRANSPORTASI	1.192	15	1.207
15.	KARYAWAN SWASTA	249.103	62.965	312.068
16.	KARYAWAN BUMN	17.390	4.320	21.710
17.	KARYAWAN BUMD	1.489	701	2.190
18.	KARYAWAN HONORER	18.978	21.300	40.278
19.	BURUH HARIAN LEPAS	95.630	5.555	101.185
20.	BURUHTANI/PERKEBUNAN	41.420	6.190	47.610
21.	BURUHNELAYAN/PERIKANAN	3.139	176	3.315
22.	BURUHPETERNAKAN	213	91	304
23.	PEMBANTURUMAHTANGGA	29	1.576	1.605
24.	TUKANGCUKUR	412	1	413
25.	TUKANGLISTRIK	445	1	446
26.	TUKANGBATU	2.218	41	2.259
27.	TUKANGKAYU	2.484	6	2.490

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		LK	PR	LK+PR
28.	TUKANGSOLSEPATU	80	5	85
29.	TUKANGLAS/PANDAIBESI	989	10	999
30.	TUKANGJAHIT	1.220	1.178	2.398
31.	TUKANGGIGI	50	8	58
32.	PENATARIAS	31	242	273
33.	PENATABUSANA	19	33	52
34.	PENATARAMBUT	112	162	274
35.	MEKANIK	3.485	12	3.497
36.	SENIMAN	187	21	208
37.	TABIB	45	22	67
38.	PARAJI	44	10	54
39.	PERANCANGBUSANA	12	32	44
40.	PENTERJEMAH	6	4	10
41.	IMAMMASJID	353		353
42.	PENDETA	906	89	995
43.	PASTOR	16		16
44.	WARTAWAN	637	47	684
45.	USTADZ/MUBALIGH	367	22	389
46.	JURUMASAK	63	67	130
47.	PROMOTORACARA	2	1	3
48.	ANGGOTADPRRI	5	1	6
49.	ANGGOTADPDRI	2	1	3
50.	ANGGOTABPK	10	5	15
53.	ANGGOTAMAHKAMAHKONSTITUSI	1		1
55.	DUTABESAR		1	1
56.	GUBERNUR	1		1
58.	BUPATI	8	2	10
59.	WAKILBUPATI	8		8
60.	WALIKOTA	2		2
61.	WAKILWALIKOTA	1		1
62.	ANGGOTADPRDPROP.	24	11	35
63.	ANGGOTADPRDKAB./KOTA	280	24	304
64.	DOSEN	2.029	1.889	3.918
65.	GURU	13.979	40.143	54.122
66.	PILOT	6	1	7
67.	PENGACARA	357	61	418
68.	NOTARIS	127	161	288
69.	ARSITEK	124	24	148
70.	AKUNTAN	21	27	48
71.	KONSULTAN	297	49	346

NO	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		
		LK	PR	LK+PR
72.	DOKTER	1.456	2.724	4.180
73.	BIDAN		7.714	7.714
74.	PERAWAT	1.266	4.126	5.392
75.	APOTEKER	85	426	511
76.	PSIKIATER/PSIKOLOG	8	41	49
77.	PENYIARTELEVISI	6	7	13
78.	PENYIARRADIO	17	17	34
79.	PELAUT	1.738	8	1.746
80.	PENELITI	121	20	141
81.	SOPIR	14.405	5	14.410
82.	PIALANG	20	12	32
83.	PARANORMAL	38	4	42
84.	PEDAGANG	18.783	5.736	24.519
85.	PERANGKATDESA	1.835	570	2.405
86.	KEPALADESA	524	12	536
87.	BIARAWAN/BIARAWATI		24	24
88.	WIRASWASTA	642.673	71.356	714.029
89.	PEKERJAANLAINNYA	6.696	3.069	9.765
JUMLAH		**3.360.287**	**3.214.645**	**6.574.932**

Sumber:Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

D. SOSIAL

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang,keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan,kesulitan atau gangguan,tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani,dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan,kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung,seperti terjadinya bencana.

2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Indikator inimenguraikan jumlah dan proporsi penyandang cacat dirinci berdasarkan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

Berikut dapat disajikan Angka proporsi penduduk Penyandang Cacat di Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel III.40
Proporsi Penduduk Penyandang Cacat Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENYANDANG CACAT	JUMLAH PENDUDUK	ANGKA PENYANDANGCACAT
1401	KAMPAR	613	816.566	0,075
1402	INDRAGIRI HULU	200	448.439	0,045
1403	BENGKALIS	343	624.231	0,055
1404	INDRAGIRI HILIR	91	667.672	0,014
1405	PELALAWAN	123	395.647	0,031
1406	ROKAN HULU	245	560.747	0,044
1407	ROKAN HILIR	166	649.212	0,026
1408	SIAK	171	459.311	0,037
1409	KUANTAN SINGINGI	77	339.333	0,023
1410	KEPULAUAN MERANTI	869	210.407	0,413
1471	KOTA PEKANBARU	431	1.074.989	0,040
1472	KOTA DUMAI	147	328.378	0,045
14	**RIAU**	**3.476**	**6.574.932**	**0,053**

Sumber:Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Proporsi penduduk penyandang cacat Provinsi Riau sebesar 0,053, angka ini termasuk kecil, namun demikian tetap harus menjadi perhatian pemerintah untuk tetap memberi kan pelayanan social bagi mereka.Indikator ini berguna untuk menyusun kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelayanan bagi penduduk penyandang cacat tersebut.

3. Proporsi Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan,pakaian,tempat berlindung, pendidikan,dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulit nya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll.

Mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar,maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Berikut ini dapat dilihat table jumlah penduduk miskindi Provinsi Riau,sebagai berikut:

Tabel III.41

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Se Provinsi Riau

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
1401	KAMPAR	352.573	816.566	43,18
1402	INDRAGIRI HULU	183.801	448.439	40,99
1403	BENGKALIS	202.041	624.231	32,37
1404	INDRAGIRI HILIR	335.541	667.672	50,26
1405	PELALAWAN	132.289	395.647	33,44
1406	ROKAN HULU	178.765	560.747	31,88
1407	ROKAN HILIR	279.589	649.212	43,07
1408	SIAK	170.383	459.311	37,10
1409	KUANTAN SINGINGI	171.603	339.333	50,57
1410	KEPULAUAN MERANTI	147.713	210.407	70,20
1471	KOTA PEKANBARU	264.754	1.074.989	24,63
1472	KOTA DUMAI	141.936	328.378	43,22
14	**RIAU**	**2.560.988**	**6.574.932**	**38,95**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2021 dan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 2.560.988 orang yaitu 38,95 persen dari jumlah penduduk Provinsi Riau dengan Kabupaten terbanyak

adalah Kabupaten Kepulauan Meranti 70,20 Persen, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Pekanbaru yaitu 24,63 persen.

III. MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah kedaerah lain.Lengkapnya,migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat lain dilokasi geografis yang berbeda dengan tujuan menetap.Setiap terjadi migrasi mengakibat kanterjadinya perubahan tempat tinggal dari suatu lokasi geografis tertentu kelokasi geografis lainnya.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat lain didalam negeri maupun dari suatu negara kenegara lain untuk menetap,baik secara perorangan, keluarga maupun berkelompok.Pengertian menetap menurut Sensus Penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal didaerah baru selama enam bulan atau lebih.

Ada beberapa sebab terjadinya migrasi, yaitu sebagai berikut:

- *Alasanekonomi,* karena kesukaran hidup disuatu daerah mendorong keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik kedaerah lain.
- *Alasanpolitis,* yaitu adanya pergolakan politik dalam suatu Negara sehingga kaum politisi pindah kenegara lain untuk mencari perlindungan dan keamanan dirinya.
- *Alasanagama,* karena kurang terjamin atau terkekang dalam kehidupan beragama penduduk pindah kedaerah lain yang sesuai dengan kehidupan agamanya.
- *Alasanlain,* misalnya bencana alam, kekeringan yang panjang, peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit.

MIGRASI

Angka Migrasi Masuk adalah angka yang menunjukkan banyaknya migran yang masuk per1.000 penduduk disuatu wilayah dalam satu tahun.

Berikut ini dapat dilihat migrasi penduduk masuk di Kabupaten/Kota se Provinsi Riaus ebagai berikut:

Tabel III.42
Angka Migrasi Masuk Antar Kabupaten Dalam Provinsi Riau

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	MIGRASI MASUK	ANGKA MIGRASIMASUK /1000
1401	KAMPAR	816.566	4.503	5,51
1402	iINHU	448.439	1.968	4,39
1403	BENGKALIS	624.231	3.127	5,01
1404	INHIL	667.672	2.081	3,12
1405	PELALAWAN	395.647	1.847	4,67
1406	ROKAN HULU	560.747	2.515	4,49
1407	ROKAN HILIR	649.212	2.889	4,45
1408	SIAK	459.311	4.211	9,17
1409	KUANSING	339.333	1.353	3,99
1410	KEP. MERANTI	210.407	600	2,85
1471	PEKANBARU	1.074.989	12.982	12,08
1472	KOTA DUMAI	328.378	2.403	7,32
14	**RIAU**	**6574932**	**40.479**	**6,16**

Sumber:Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Angka migrasi masuk antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terbesar terdapat di Kabupaten Pelalawan yaitu sebesar 249,36 yang artinya dari 1.000 penduduk ada 249 orang dari Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau yang pindah Ke Kabupaten Pelalawan, sedangkan Kabupaten/Kota yang paling kecil angka migrasi masuknya adalah Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 4,03 persen.

Angka migrasi masuk antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ini hanya mempengaruhi Komposisi Kabupaten/Kota tidak berdampak dengan pertambahan penduduk Provinsi Riau secara menyeluruh.

BAB IV

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Produk yang dihasilkan dari layanan kependudukan berupa Dokumen Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik.

Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk, merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap status hak sipil Penduduk, dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Bagi Pemerintah dokumen kependudukan merupakan

kewajiban Negara untuk memberikan status legal bagi warganya,sekaligus sebagai sumber data kependudukan.

Pemberian dokumen ini, sebelum diberlakukan UU No 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk harus melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka,. Akan tetapi sejak diberlakukannya UU No. 24 Tahun 2013 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka stelsel aktif di balik menjadi petugas yang aktif.

I. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinan nya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut.

Seorang kepala keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas yang memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu keluarga, nama lengkap tiap anggota keluarga, jenis kelamin, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, agama, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.

Kegunaan Kartu Keluarga antara lain sebagai persyaratan untuk membuat KTP dan persyaratan untuk membuat akte kelahiran. Ketika anak mendaftar sekolah

juga butuh kartu keluarga.Kartu keluarga tidak ada masa berlakunya. Terdapat nomor seri pada kartu keluarga yang akan tetap berlaku selama tidak terjadi perubahan.

Berikut ini dapat dilihat jumlah kepala keluarga yang sudah memiliki dan sudah mencetak kartu keluarga Tahun 2021 Kemendagri RI sebagai berikut :

Tabel IV.1
Jumah Kepala Keluarga yang Sudah Memiliki dan Mencetak Kartu Keluarga
Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	KEPALA KELUARGA			
		SUDAH CETAK KK	BELUM CETAK KK	% YANG BELUM CETAK KK	JUMLAH
1401	KAMPAR	217.350	25.060	11,53	242.410
1402	INDRAGIRI HULU	119.050	14.032	11,79	133.082
1403	BENGKALIS	171.962	6.449	3,75	178.411
1404	INDRAGIRI HILIR	168.381	41.836	24,85	210.217
1405	PELALAWAN	108.657	6.800	6,26	115.457
1406	ROKAN HULU	150.217	8.934	5,95	159.151
1407	ROKAN HILIR	164.014	18.645	11,37	182.659
1408	SIAK	130.355	54	0,04	130.409
1409	KUANTAN SINGINGI	99.327	4.493	4,52	103.820
1410	KEPULAUAN MERANTI	56.868	4.744	8,34	61.612
1471	KOTA PEKANBARU	312.590	71	0,02	312.661
1472	KOTA DUMAI	92.641	4.782	5,16	97.423
14	**RIAU**	**1.791.412**	**135.900**	7,59	**1.927.312**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Jumlah Kepala Keluarga di Provinsi Riau adalah sebesar 1.927.312 KK, dimana sebanyak 135.900 KK atau 7,59 persen belum memiliki Kartu Keluarga. Adapun Kabupaten terbesar yang belum memiliki Kartu Keluarga adalah Indragiri Hilir sebesar 24,85 persen dari jumlah Kepala Keluarga yang ada. Sedangkan Kabupaten Paling sedikit belum mencetak Kartu Keluarga adalah Kota Pekanbaru sebesar 0,02 persen atau Kepala Keluarga.

Berikut dapat dilihat diagram persentase kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar IV.1
Jumlah Kepala Keluarga yang Sudah dan Belum Mencetak KK
Di Provinsi Riau Tahun 2021

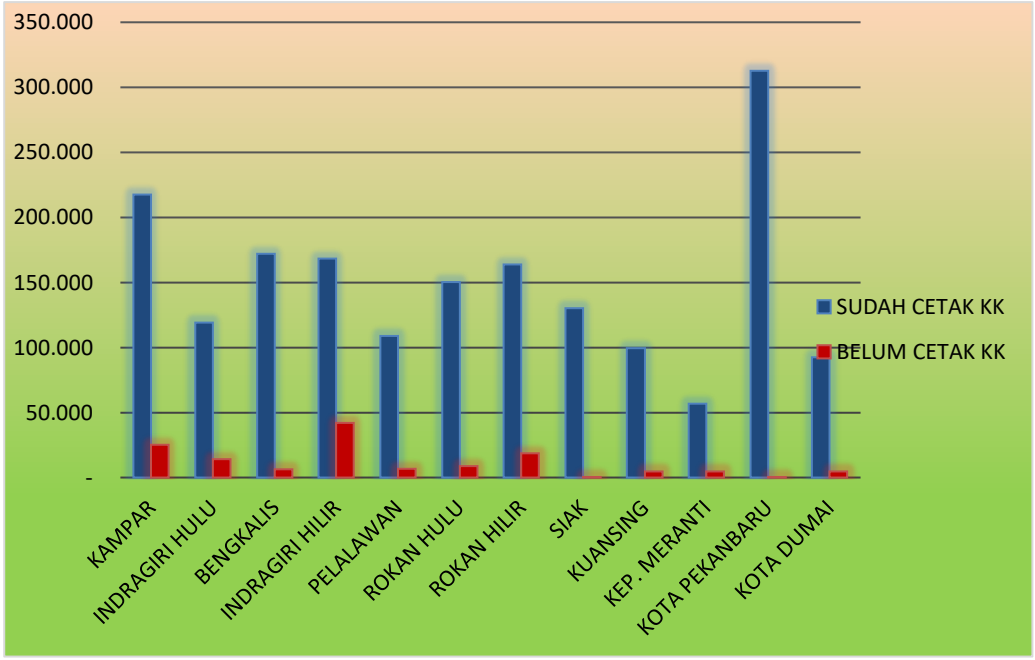

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

II. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. KTP tersebut diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah menikah/kawin atau sudah pernah menikah/kawin. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya. Misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya.

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup.

Tabel IV.2
Jumlah Wajib KTP yang sudah dan Belum Mencetak KTP-el
Di Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH WAJIB KTP-EL	SUDAH CETAK KTP EL	BELUM CETAK KTP EL	% YANG SUDAH CETAK KTP-EL
1401	KAMPAR	553.536	539.121	14.410	97,40
1402	INDRAGIRI HULU	300.742	287.570	13.167	95,62
1403	BENGKALIS	423.662	416.440	7.214	98,30
1404	INDRAGIRI HILIR	472.005	443.651	28.348	93,99
1405	PELALAWAN	256.769	244.322	12.408	95,15
1406	ROKAN HULU	378.590	352.756	8.877	93,18
1407	ROKAN HILIR	433.021	404.852	18.529	93,49
1408	SIAK	307.324	294.914	12.409	95,96
1409	KUANTAN SINGINGI	236.075	227.734	5.779	96,47
1410	KEPULAUAN MERANTI	150.904	139.934	2.215	92,73
1471	KOTA PEKANBARU	744.687	699.864	44.812	93,98
1472	KOTA DUMAI	219.806	216.319	3.483	98,41
14	**RIAU**	**4.477.121**	**4.267.477**	**171.651**	**95,32**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Jumlah penduduk wajib KTP yang sudah melakukan pencetakan KTP-el di Provinsi Riau adalah sebesar 4.477.121 orang, sedangkan yang belum mencetak sebesar 171.651 orang dari jumlah wajib KTP Elektronik, persentase yang sudah cetak mencapai 95,32 % . Adapun Kabupaten/Kota yang paling rendah pencetakan KTP Elektronik adalah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 92,73 persen. .

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat grafik kepemilikan KTP Elektronik Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sebagai berikut :

Gambar IV.2
Jumlah Wajib KTP yang Sudah dan Belum Mencetak KTP-El
Di Provinsi Riau Tahun 2021

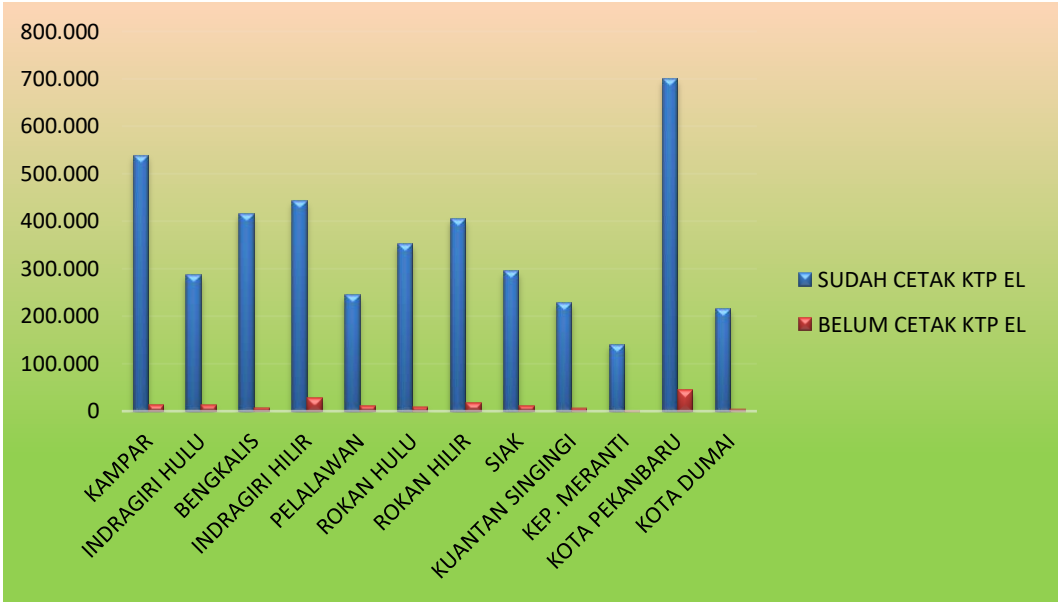

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

III. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian.

1. Akta Kelahiran

Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena

digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor

Akta kelahiran merupakan hak anak. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Kemudian hal ini juga ditegaskan pada pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) berbunyi "identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahirann". Sementara itu UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Selain itu UUD 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, "setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel IV.3
Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Kelahiran
Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	SUDAH PUNYA AKTA LAHIR	BELUM PUNYA AKTA LAHIR	% YANG BELUM PUNYA AKTA LAHIR	JUMLAH PENDUDUK
1401	KAMPAR	314.512	502.054	61,48	816.566
1402	INDRAGIRI HULU	169.442	278.997	62,22	448.439
1403	BENGKALIS	273.829	350.402	56,13	624.231
1404	INDRAGIRI HILIR	246.488	421.184	63,08	667.672
1405	PELALAWAN	163.899	231.748	58,57	395.647
1406	ROKAN HULU	236.634	324.113	57,80	560.747
1407	ROKAN HILIR	195.217	453.995	69,93	649.212
1408	SIAK	196.738	262.573	57,17	459.311
1409	KUANTAN SINGINGI	126.606	212.727	62,69	339.333
1410	KEPULAUAN MERANTI	83.951	126.456	60,10	210.407
1471	KOTA PEKANBARU	428.688	646.301	60,12	1.074.989
1472	KOTA DUMAI	162.894	165.484	50,39	328.378
14	**RIAU**	**2.598.898**	**3.976.034**	**60,47**	**6.574.932**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran di Provinsi Riau adalah 2.598.898 orang dan yang belum memiliki akta kelahiran sebesar 3.976.034 orang. Jumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran masih sangat banyak yaitu 60,47 persen. Dimana Kabupaten/Kota terbesar yang belum memiliki akta lahir bila dibandingkan jumlah penduduknya adalah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 69,93 persen dan yang paling sedikit adalah Kota Dumai yaitu 50,39 persen.

Berikut ini dapat dilihat grafik kepemilikan Akte Kelahiran di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sebagai berikut:

Gambar IV.3
Penduduk yang Telah dan Belum Memiliki Akta Kelahiran Tahun 2021

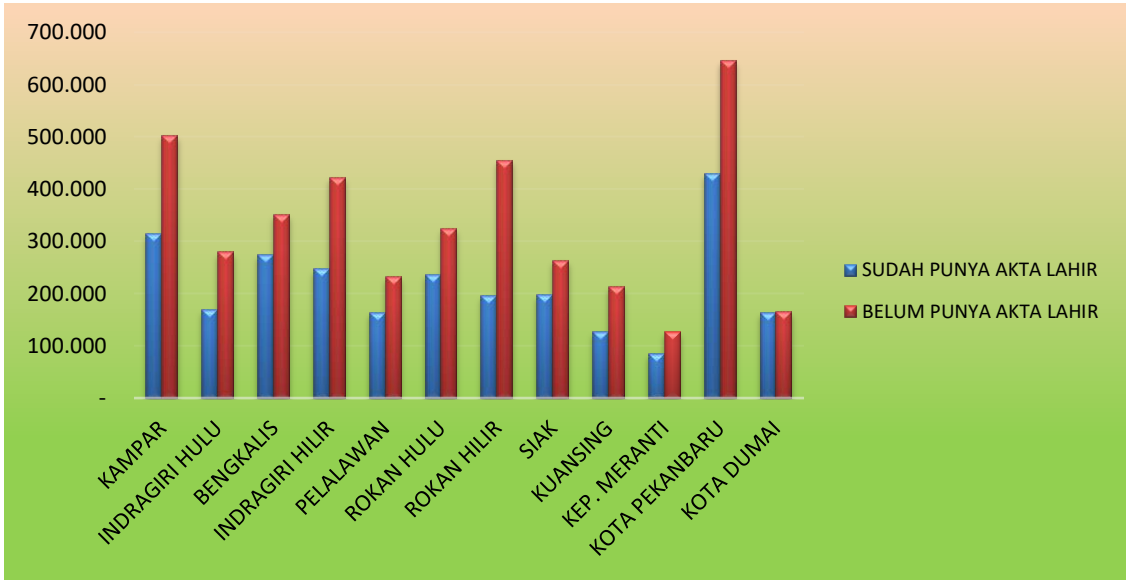

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

Kepemilikan akta kelahiran berdasarkan kelompok umur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.4
Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Kelahiran Berdasarkan kelompok umur Provinsi Riau Tahun 2021

NO URUT	KELOMPOK UMUR	SUDAH PUNYA AKTA LAHIR			BELUM PUNYA AKTA LAHIR			JUMLAH
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	
1	00-01	9.203	8.356	17.559	602	561	1.163	18.722
2	>01-05	29.528	27.459	56.987	1.917	1.700	3.617	60.604
3	>05-17	78.266	73.316	151.582	19.273	17.913	37.186	188.768
4	>17+	44.522	43.862	88.384	233.783	226.305	460.088	548.472
5	**KAB. KAMPAR**	**161.519**	**152.993**	**314.512**	**255.575**	**246.479**	**502.054**	**816.566**
6	00-01	4.352	4.092	8.444	351	297	648	9.092
7	>01-05	15.023	13.949	28.972	1.825	1.694	3.519	32.491
8	>05-17	44.536	42.079	86.615	11.417	10.483	21.900	108.515
9	>17+	22.973	22.438	45.411	129.233	123.697	252.930	298.341
10	**KAB. INDRAGIRI HULU**	**86.884**	**82.558**	**169.442**	**142.826**	**136.171**	**278.997**	**448.439**
11	00-01	8.223	7.558	15.781	610	593	1.203	16.984
12	>01-05	21.456	19.968	41.424	2.166	1.902	4.068	45.492
13	>05-17	66.242	62.881	129.123	8.567	8.200	16.767	145.890
14	>17+	45.809	41.692	87.501	166.210	162.154	328.364	415.865
15	**KAB. BENGKALIS**	**141.730**	**132.099**	**273.829**	**177.553**	**172.849**	**350.402**	**624.231**
16	00-01	3.016	2.714	5.730	1.540	1.351	2.891	8.621
17	>01-05	15.622	14.929	30.551	5.940	5.285	11.225	41.776
18	>05-17	62.350	58.715	121.065	14.896	13.571	28.467	149.532
19	>17+	46.570	42.572	89.142	195.201	183.400	378.601	467.743
20	**KAB. INDRAGIRI HILIR**	**127.558**	**118.930**	**246.488**	**217.577**	**203.607**	**421.184**	**667.672**
21	00-01	4.681	4.237	8.918	182	168	350	9.268
22	>01-05	14.745	13.805	28.550	1.547	1.406	2.953	31.503
23	>05-17	42.081	39.048	81.129	10.427	9.762	20.189	101.318
24	>17+	23.650	21.652	45.302	106.822	101.434	208.256	253.558
25	**KAB. PELALAWAN**	**85.157**	**78.742**	**163.899**	**118.978**	**112.770**	**231.748**	**395.647**
26	00-01	5.231	4.987	10.218	15	14	29	10.247
27	>01-05	18.881	17.956	36.837	167	145	312	37.149
28	>05-17	65.481	61.770	127.251	9.157	8.543	17.700	144.951
29	>17+	32.142	30.186	62.328	154.547	151.525	306.072	368.400
30	**KAB. ROKAN HULU**	**121.735**	**114.899**	**236.634**	**163.886**	**160.227**	**324.113**	**560.747**
31	00-01	5.194	4.906	10.100	667	655	1.322	11.422
32	>01-05	20.417	19.349	39.766	3.233	2.860	6.093	45.859
33	>05-17	53.437	51.151	104.588	31.405	28.567	59.972	164.560
34	>17+	20.635	20.128	40.763	197.747	188.861	386.608	427.371
35	**KAB. ROKAN HILIR**	**99.683**	**95.534**	**195.217**	**233.052**	**220.943**	**453.995**	**649.212**
36	00-01	5.516	5.214	10.730	28	22	50	10.780
37	>01-05	16.325	15.341	31.666	765	716	1.481	33.147
38	>05-17	45.111	42.481	87.592	13.205	11.985	25.190	112.782
39	>17+	34.765	31.985	66.750	120.413	115.439	235.852	302.602
40	**KAB. SIAK**	**101.717**	**95.021**	**196.738**	**134.411**	**128.162**	**262.573**	**459.311**
41	00-01	3.394	3.225	6.619	345	304	649	7.268
42	>01-05	10.454	9.844	20.298	1.384	1.246	2.630	22.928
43	>05-17	29.856	28.044	57.900	9.268	8.348	17.616	75.516
44	>17+	21.604	20.185	41.789	96.168	95.664	191.832	233.621
45	**KAB. KUANTAN SINGINGI**	**65.308**	**61.298**	**126.606**	**107.165**	**105.562**	**212.727**	**339.333**
46	00-01	2.453	2.350	4.803	97	94	191	4.994
47	>01-05	6.614	6.163	12.777	577	574	1.151	13.928
48	>05-17	18.973	18.255	37.228	3.810	3.403	7.213	44.441
49	>17+	15.755	13.388	29.143	60.193	57.708	117.901	147.044
50	**KAB. KEPULAUAN MERANT**	**43.795**	**40.156**	**83.951**	**64.677**	**61.779**	**126.456**	**210.407**
51	00-01	13.338	12.517	25.855	59	42	101	25.956
52	>01-05	39.280	36.421	75.701	340	302	642	76.343
53	>05-18	105.580	99.132	204.712	18.673	16.394	35.067	239.779
54	>18+	60.568	61.852	122.420	302.976	307.515	610.491	732.911
55	**KOTA PEKANBARU**	**218.766**	**209.922**	**428.688**	**322.048**	**324.253**	**646.301**	**1.074.989**
56	00-01	4.233	3.844	8.077	233	242	475	8.552
57	>01-05	12.595	11.629	24.224	698	619	1.317	25.541
58	>05-17	35.733	33.387	69.120	4.161	3.735	7.896	77.016
59	>17+	32.157	29.316	61.473	78.877	76.919	155.796	217.269
60	**KOTA DUMAI**	**84.718**	**78.176**	**162.894**	**83.969**	**81.515**	**165.484**	**328.378**
61	**PROV. RIAU**	**1.338.570**	**1.260.328**	**2.598.898**	**2.021.717**	**1.954.317**	**3.976.034**	**6.574.932**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

Tabel diatas menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran per Kabupaten/Kota dikelompokan berdasarkan umur 00 – 18 tahun yang merupakan usia anak dan umur >18+ yang merupakan usia dewasa.

Dari pengelompokkan tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran terbanyak adalah kelompok umur 00 – 18 tahun sedangkan yang diatas 18 tahun masih sangat sedikit. Hal tersebut yang menyebabkan persentase kepemilikan akte kelahiran secara keseluruhan masih kecil, karena penduduk umur 18 tahun keatas banyak yang belum memiliki akte kelahiran.

2. Akta Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974). Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Akta perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang syah antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya

Adapun kegunaan akta perkawinan antara lain adalah :

1. Bukti otentik perkawinan yang sah (UU No. 1/1974, Bab I Pasal 1-5)
2. Adanya jaminan dan kepastian hukum (UU No. 1/1974, Bab VI Pasal 30-34)
3. Menjamin hak – hak waris (UU No. 1/1974, Bab VII pasal 35-37)

4. Membuat akta kelahiran /Akta kenal lahir anak (UU No. 1/1974, Bab IX pasal 42-44)
5. Menjamin hak-hak anak/keturunan (UU No. 1/1974, Bab X pasal 45 -49)
6. Pengurusan dokumen penting, dan lain-lain.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel IV.5
Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Kawin
Per Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	SUDAH PUNYA AKTA KAWIN	BELUM PUNYA AKTA KAWIN	% PENDUDUK YANG BLM PUNYA AKTA KAWIN	JML PENDUDUK SUDAH KAWIN
1401	KAMPAR	226.128	41.966	53,35	268.094
1402	INDRAGIRI HULU	124.031	26.067	56,62	150.098
1403	BENGKALIS	186.328	22.038	54,58	208.366
1404	INDRAGIRI HILIR	157.346	42.583	75,51	199.929
1405	PELALAWAN	118.597	23.492	43,58	142.089
1406	ROKAN HULU	174.306	18.041	59,8	192.347
1407	ROKAN HILIR	154.454	67.387	70,71	221.841
1408	SIAK	129.988	26.721	28,23	156.709
1409	KUANTAN SINGINGI	84.817	20.895	75,3	105.712
1410	KEPULAUAN MERANTI	54.808	8.555	48,94	63.363
1471	KOTA PEKANBARU	306.268	35.810	47,45	342.078
1472	KOTA DUMAI	101.421	9.688	32,23	111.109
14	**RIAU**	**1.818.492**	**343.243**	**55,03**	**2.161.735**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

Sedangkan kepemilikan akta kawin berdasarkan kelompok umur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.6
Jumlah Penduduk yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Kawin
Berdasarkan kelompok umur Provinsi Riau Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	SUDAH PUNYA AKTA KAWIN		BELUM PUNYA AKTA KAWIN		JUMLAH PENDUDUK SUDAH KAWIN		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK+PR
1401	KAMPAR	105.719	101.520	87.945	95.653	193.691	197.245	390.936
1402	INDRAGIRI HULU	54.614	53.538	53.230	54.452	107.902	108.057	215.959
1403	BENGKALIS	87.370	88.008	37.875	38.151	141.384	142.233	283.617
1404	INDRAGIRI HILIR	54.374	53.536	108.584	108.653	163.513	162.769	326.282
1405	PELALAWAN	59.818	58.548	33.950	34.759	94.032	93.577	187.609
1406	ROKAN HULU	62.978	62.822	66.362	68.683	129.392	131.569	260.961
1407	ROKAN HILIR	45.988	45.140	101.275	102.959	147.478	148.281	295.759
1408	SIAK	82.221	77.778	24.268	29.143	106.527	106.985	213.512
1409	KUANTAN SINGINGI	29.468	29.561	51.667	53.920	81.189	83.543	164.732
1410	KEPULAUAN MERANTI	28.031	26.001	18.718	21.255	46.756	47.266	94.022
1471	KOTA PEKANBARU	141.620	143.554	98.188	102.447	239.981	246.335	486.316
1472	KOTA DUMAI	51.675	51.801	21.067	22.074	72.826	74.003	146.829
14	**RIAU**	**803.876**	**791.807**	**703.129**	**732.149**	**1.524.671**	**1.541.863**	**3.066.534**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2021

3. Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Akta percecaian ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah adanya putusan pengadilan. Pejabat yang berwenang adalah panitera PA atas nama Ka.PA (untuk yang islam) dan Kacapil (untuk yang non islam). Bagi yang non islam maka syarat untuk diterbitkannya akta perceraian adalah :

1. Ada penetapan perceraian dari PN yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/ tetap
2. Harus ada akta perkawinan

Yang dimuat dalam akta perceraian adalah :Tanggal putusan pengadilan tentang perceraian Nama pasangan suami istri yang cerai Tanggal pembuatan akta perceraian Alasan pecahanya atau bubarnya perkawinan.

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai, baik cerai hidup (cerai sesuai peraturan yang berlaku) maupun cerai mati. Akan tetapi selama ini penduduk tidak melaporkan data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sehingga data belum tercatat dalam database kependudukan.

Perubahan data kependudukan hanya terjadi jika terjadi sewaktu penduduk melakukan perubahan Kartu Keluarga atau untuk kepentingan lain.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel IV.7
Jumlah Penduduk Yang Sudah Memiliki dan Belum Memiliki Akta Cerai
Provinsi Riau Tahun 2021.

NO URUT	KELOMPOK UMUR	SUDAH PUNYA AKTA KAWIN		BELUM PUNYA AKTA KAWIN		JUMLAH PENDUDUK SUDAH KAWIN		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK+PR
1	10-14		1		3		4	4
2	15-19	299	2.848	191	955	491	3.811	4.302
3	20-24	19.486	59.005	3.151	11.066	22.697	70.413	93.110
4	25-29	94.245	138.354	19.481	46.837	114.342	186.561	300.903
5	30-34	137.484	145.831	55.074	90.672	194.078	238.714	432.792
6	35-39	142.901	135.226	99.354	123.697	244.759	261.911	506.670
7	40-44	121.340	106.286	113.868	121.040	238.136	230.354	468.490
8	45-49	99.088	82.523	110.491	107.772	212.436	192.871	405.307
9	50-54	75.150	57.343	94.370	82.505	171.956	141.833	313.789
10	55-59	53.087	36.107	72.616	61.939	127.402	99.519	226.921
11	60-64	32.552	17.798	56.117	42.982	89.991	61.736	151.727
12	65-69	16.739	7.181	37.609	23.850	55.202	31.622	86.824
13	70-74	6.987	2.311	20.351	10.836	27.789	13.383	41.172
14	≥75	4.518	993	20.456	7.995	25.392	9.131	34.523
JUMLAH		**803.876**	**791.807**	**703.129**	**732.149**	**1.524.671**	**1.541.863**	**3.066.534**

Sumber : Hasil Olahan Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

4. Akta Kematian

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan.

Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Setiap ***"Kematian"*** wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah/sejak ***"kematian"***. Bagi Warga Negara Indonesia yang meninggal dunia di Luar Negeri, wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Sedangkan Warga Negara Asing batas waktu pelaporannya adalah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ***"kematian"***nya dan apabila melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka lebih dulu harus melalui Sidang Pengadilan Negeri.

Adapun kegunaan akta kematian, adalah sebagai berikut :

1. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak.
2. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya
4. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya.

Berikut ini dapat dilihat jumlah penduduk yang memiliki akta kematian di Provinsi Riau sebagai berikut :

Tabel IV.8
Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan Per Kabupaten/Kota Seprovinsi Riau
Tahun 2021

NO. KAB	KABUPATEN/KOTA	AKTA KEMATIAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1401	KAMPAR	10.637	6.054	16.691
1402	INDRAGIRI HULU	3.777	2.785	6.562
1403	BENGKALIS	5.276	3.247	8.523
1404	INDRAGIRI HILIR	2.788	1.467	4.255
1405	PELALAWAN	2.026	941	2.967
1406	ROKAN HULU	5.371	2.802	8.173
1407	ROKAN HILIR	6.412	3.326	9.738
1408	SIAK	5.806	3.406	9.212
1409	KUANTAN SINGINGI	3.735	2.188	5.923
1410	KEPULAUAN MERANTI	1.767	1.034	2.801
1471	KOTA PEKANBARU	23.018	13.170	36.188
1472	KOTA DUMAI	6.350	3.636	9.986
14	**RIAU**	**76.963**	**44.056**	**121.019**

Sumber : Data Pelayanan Disdukcapil Kab/Kota Se Provinsi Riau Semester II Tahun 2021

BAB V

PENUTUP

Data perkembangan kependudukan merupakan data yang strategis dan sangat dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Provinsi Riau mempunyai luas wilayah 87.023,66 Km^2 yang terbagi dalam 10 Kabupaten dan 2 Kota dengan luas yang bervariasi. Sampai bulan Desember tahun 2021 Provinsi Riau berpenduduk sebesar **6.574.932** jiwa yang terdiri dari **3.360.287** jiwa laki-laki dan **3.214.645** jiwa perempuan.

I. KESIMPULAN

A. Aspek Kuantitas

1. Kepadatan penduduk Provinsi Riau tahun 2021 adalah 75,55. Angka tersebut termasuk kategori Kurang Padat. Namun bila dilihat per Kabupaten/Kota, Kota pekanbaru termasuk Kota yang sangat padat penduduknya yaitu sebesar 7.700,21 dikarenakan Mempunyai wilayah yang kecil namun jumlah penduduk paling banyak di Provinsi Riau. Sedangkan yang paling kecil tingkat kepadatan penduduknya adalah Kabupaten Pelalawan, berada dikategori tidak padat.
2. Laju pertumbuhan penduduk selama 5 (lima) tahun terakhir, terhitung dari tahun 2017 s/d 2021 semester II adalah 1,80 persen, angka tersebut tergolong sedang yaitu dibawah 2 persen.
3. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Riau sebesar 104,53 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki, yang berarti juga bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan.

4. Rasio ketergantungan di Provinsi Riau 46,32 persen, artinya setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja) di Provinsi Riau menanggung 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.
5. Kepala Keluarga di Provinsi Riau berjumlah 1.927,178 kepala keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 3 – 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata anggota keluarga pada setiap Kepala Keluarga merupakan keluarga inti.
6. Persentase rata-rata kepala keluarga laki-laki di Provinsi Riau adalah sebesar 84,72%. Sedangkan kepala keluarga perempuan 15,28. Bila dilihat dari status kawinnya yang berstatus kawin 1.615.613 KK, cerai mati 162.096 KK, belum kawin 91.531 dan cerai hidup 57.938 KK.
7. Menurut tingkat pendidikan terakhir, penduduk di Provinsi Riau banyak yang masih tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 19,48 persen, SLTP 13,24 persen, SLTA 19,87 persen, dan berpendidikan Diploma ke atas secara keseluruhannya hanya mencapai ±5,96 persen. Sedangkan sisanya sebanyak berstatus tidak/blm sekolah dan belum tamat SD/sederajat yang diasumsikan penduduk berusia sekolah SD atau belum mencapai usia sekolah.
8. Hampir semua agama tersebar di Kabupaten/Kota, kecuali agama Khonghucu tidak terdapat di kabupaten Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi. Mayoritas penduduk Riau adalah agama Islam sebesar 87,09 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
9. Jumlah penduduk cacat di Provinsi Riau berjumlah 3.476 jiwa. Jumlah penduduk cacat terbesar adalah Kepulauan Meranti yaitu 869 jiwa. Sedangkan untuk jenis kecacatan terbesar adalah cacat lainnya dan cacat fisik sebesar 1.055 jiwa dan 812 jiwa.

B. Aspek Kualitas

1. Jumlah kelahiran di Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 130.651 kelahiran dengan jumlah penduduk wanita usia antara 15 – 49 tahun sebesar 1.823.957 penduduk, sehingga menghasilkan angka kelahiran umum sebesar 71,87 per 1000 penduduk wanita usia 15 – 49 tahun.
2. Rasio Anak dengan Perempuan Usia Subur di Provinsi Riau adalah 26,56 bearti dari 1000 perempuan usia subur terdapat 27 orang balita.
3. Penggunaan alat kontrasepsi di Provinsi Riau sebanyak 862.200 akseptor dengan alat kontrasepsi paling banyak digunakan adalah suntikan sebesar 369.054 akseptor, kemudian Pil sebanyak 250.852 akseptor.
4. Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Riau tahun 2021 adalah 5 per 1000 kelahiran, artinya diantara 1000 kelahiran hidup ada 5 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 tahun., Angka kematian neonatal di Provinsi Riau Tahun 2021 sebesar 3,80 per 1000 kelahiran artinya terdapat 3 bayi yang meninggal pada bulan pertama sejak dilahirkan.
5. Jenis Kematian Ibu di Provinsi Riau adalah pada saat ibu hamil, saat bersalin dan saat nifas dengan jumlah 180 orang atau 1,38 % dari jumlah lahir hidup.
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat Sekolah Dasar lebih dari 100 persen yang artinya ada murid Sekolah Dasar yang usianya diluar usia sekolah (7-12 tahun), sedangkan tingkat SMP adalah 69,64 % dan SMA 57,79 % .
7. Proporsi tenaga kerja di Provinsi Riau Tahun 2021 adalah 68,34 persen, artinya ada 68,34 persen dari jumlah penduduk yang berusia produktif. Angka pengangguran terbuka di Provinsi Riau sebesar 19,47 persen, angka ini menunjukkan bahwa 19,47 persen dari 2.387.626 penduduk Riau mengganggur

atau mencari pekerjaan. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Riau sebesar 63,13 persen, artinya jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun terdapat 63,13 persen yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan.

8. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 2.560.988 orang yaitu 38,95 persen dari jumlah penduduk Provinsi Riau.

C. Aspek Migrasi Penduduk

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat lain didalam negeri maupun dari suatu negara kenegara lain untuk menetap,baik secara perorangan, keluarga maupun berkelompok.Pengertian menetap menurut Sensus Penduduk Indonesia adalah orang yang tinggal didaerah baru selama enam bulan atau lebih. Angka Migrasi masuk di Provinsi Riau berjumlah 6,16 per 1000 penduduk.

D. Aspek Kepemilikan Dokumen

1. Jumlah Kepala Keluarga di Provinsi Riau adalah sebesar 1.927.312 KK, dimana sebanyak 1.791.412 sudah mencetak KK dan 135.900 belum mencetak KK atau 7,59 persen belum mencetak atau memiliki Kartu Keluarga, dikarenakan saat ini sudah sudah menggunakan tanda tangan elektronik sehingga Kartu Keluarga yang menggunakan tanda tangan manual dan belum diperbaharui tidak terdata di Database Kependudukan.
2. Jumlah penduduk wajib KTP di Provinsi Riau 4.477.121 orang yang sudah melakukan pencetakan KTP-el di Provinsi Riau adalah sebesar 4.267.477 orang, sedangkan yang belum mencetak sebesar 171.651 orang .
3. Jumlah penduduk yang belum memiliki Akta kelahiran sebesar 60,47 persen, akta kawin sebesar 55,03 persen, dan akta cerai sebesar 53,10 persen. Sedangkan

penduduk yang mengurus akta kematian di Provinsi Riau sebesar 14.095 akta dengan Kabupaten/Kota terbanyak adalah Kabupaten Siak sebesar 3.611 akta.